



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EVALUASI PENERAPAN *SePP* (SISTEM *e*-PENGADAAN  
PEMERINTAH)  
MENURUT PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*  
DI DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi**

**EVIANA D. SOFYANINGRUM  
0806470674**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCA SARJANA  
Kekhususan: Administrasi dan Kebijakan Publik**

**JAKARTA  
JUNI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eviana D. Sofyaningrum

NPM : 0806470674

Tanda Tangan :

Tanggal :

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Eviana D. Sofyaningrum  
NPM : 0806470674  
Judul : Evaluasi Penerapan SePP (Sistem e-Pengadaan Pemerintah)  
Menurut Perspektif *Good Governance* di Departemen Komunikasi  
dan Informatika

Pembimbing Tesis

(Prof . Dr. Azhar Kasim, MPA.)

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Eviana D. Sofyaningrum  
NPM : 0806470674  
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Evaluasi Penerapan *SePP* (Sistem *e*-Pengadaan  
Pemerintah) Menurut Perspektif *Good Governance*  
Di Departemen Komunikasi dan Informatika

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang : Prof. Dr. Martani Huseini ( )  
Pembimbing : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA. ( )  
Penguji : Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.,Sc ( )  
Sekretaris Sidang : Lina Miftahul Jannah, s.Sos.,M.Si. ( )

Ditetapkan di :  
Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa terucap kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari awal masa perkuliahan hingga sampai akhir penulisan tesis ini, saya tidak akan dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ijin saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof Dr. Azhar Kasim, MPA, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Prof. Eko Prasajo, Mag.rer.publ, selaku Ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Lina Miftahul Jannah, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini.
4. Dra. Sri Cahaya K, selaku Direktur e-Bussiness sekaligus Kepala PPE Depkominfo, yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian tentang SePP.
5. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KESDM, Dra. Indriyati, M.M.beserta Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Dra. Sumiaty Nadeak, M.M., yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang pascasarjana.
6. Kepala Bagian Layanan PPE, Bapak Nova Zanda, yang banyak membantu memberikan masukan dan bahan dalam penelitian ini.

7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf di lingkungan Program Studi Administrasi, yang telah memberikan bekal pengetahuan dan ilmu yang dapat mendukung dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak/Ibu pegawai di Pusat Pengadaan Elektronik, terimakasih atas kerja sama dan bantuan dalam kelancaran penulisan tesis ini.
9. Kepala Subbagian Tata Laksana KESDM, Bapak Sugindar, S. Sos, terima kasih atas masukan dan sharing ilmunya sehingga dapat memberi pencerahan kepada penulis terutama tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
10. Kedua orang tuaku, Muhajir Ashari dan Rr.Erawaty, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya.
11. Suamiku, Edy Afrianto, yang sangat memberi dukungan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir penulisan tesis ini.
12. Anak-anakku, Affan Luqmanul Hakim dan Zahraian Arvina Rayya, you are my inspiration.
13. Teman-teman angkatan XVI, Nurul Safitri, makasih tutorialnya, mb santi dan mb Nanik yang selalu memotivasi dengan diskusinya, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Rekan-rekan di Biro Kepegawaian dan Organisasi, terutama di Bagian Ortala, thanks all, dan
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis, sehingga penulis sangat membuka diri jika ada yang memberi kritikan, masukan dan pendapat dalam rangka penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan tesis ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Jakarta, Juli 2010

Eviana D. Sofyaningrum

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eviana D. Sofyaningrum  
NPM : 0806470674  
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Publik  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI PENERAPAN *SePP* (SISTEM *e*-PENGADAAN  
PEMERINTAH)  
MENURUT PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*  
DI DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal :

Yang menyatakan

Eviana D. Sofyaningrum

## ABSTRAK

Nama : Eviana D. Sofyaningrum  
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Publik  
Judul : Evaluasi Penerapan SePP (Sistem e-Pengadaan  
Pemerintah) Menurut Perspektif Good Governance di  
Departemen Komunikasi dan Informatika

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerapan SePP menurut perspektif *good governance* di Departemen Komunikasi dan Informatika. Dimensi *good governance* yang digunakan antara lain efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi.

Penelitian ini dilakukan terhadap 100 perusahaan yang terdaftar dalam SePP yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis univariat.

Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa hasil evaluasi penerapan SePP pada umumnya adalah sangat baik, yaitu efisien dari segi biaya dan waktu, akuntabel, responsif, transparan dan partisipatif.

Jika dilihat dari masing-masing dimensi *good governance*, pada umumnya responden menilai evaluasi penerapan SePP memberikan skor yang paling tinggi pada dimensi responsibilitas, dan responden cenderung memberikan nilai yang kurang baik pada dimensi akuntabilitas.

Kata kunci: evaluasi, SePP, *Good Governance*,

## ABSTRACT

Name : Eviana D. Sofyaningrum  
Study Programme : Administration and Public Policy  
Judul : Evaluasi Penerapan SePP (Sistem e-Pengadaan  
Pemerintah) Menurut Perspektif Good Governance di  
Departemen Komunikasi dan Informatika

The purpose of this study is to determine how the evaluation of the implementation of SePP according to the perspective of good governance in the Ministry of Communications and Information Technology. Dimensions of good governance which is used among others are efficiency, accountability, responsiveness, transparency and participation.

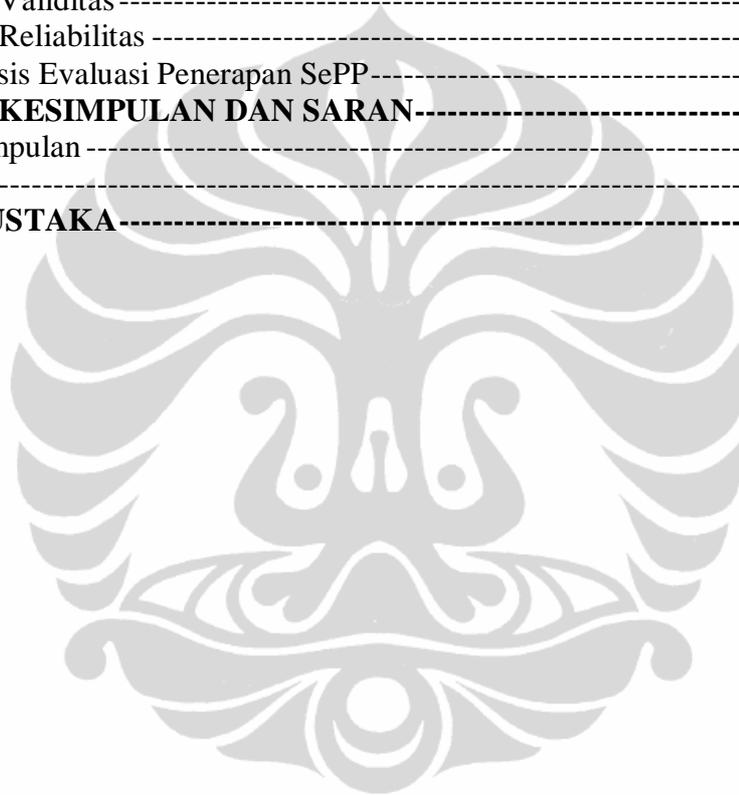
This research was conducted on 100 companies listed in the SePP taken as samples in this study. The analysis in this study is the univariate analysis. Based on this analysis, we concluded that the results of evaluation of the implementation of SePP in general is very good, that is efficient in terms of cost and time, accountable, responsive, transparent and participatory. If viewed from each of the dimensions of good governance, in general, respondents rate the application evaluation SePP gave the highest score in the dimension of responsibility, and respondents tended to give less good value in the dimension of accountability.

key word: evaluation, SePP, Good Governance

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> -----	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> -----	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS</b> -----	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> -----	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> -----	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> -----	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> -----	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> -----	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> -----	<b>xiii</b>
<b>1. BAB I: PENDAHULUAN</b> -----	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang-----	1
1.2. Pokok Permasalahan-----	10
1.3. Tujuan Penelitian-----	10
1.4. Signifikansi Penelitian-----	10
1.5. Keterbatasan Penelitian-----	11
1.6. Sistematika Penulisan-----	11
<b>2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> -----	<b>13</b>
2.1. Tinjauan Pustaka-----	13
2.1.1. Sistem Informasi-----	14
2.1.2. E-Government-----	17
2.1.3. E- Procurement-----	24
2.1.4. Good Governance-----	27
2.1.5. Implementasi SePP Menurut Perspektif Good Governance-----	32
2.2. Model Analisis-----	35
2.3. Hipotesis-----	35
2.4. Operasionalisasi Konsep-----	36
<b>3. BAB III: METODE PENELITIAN</b> -----	<b>39</b>
3.1. Pendekatan Penelitian-----	39
3.2. Jenis Penelitian-----	39
3.3. Teknik Pengumpulan Data-----	39
3.4. Populasi dan Sampel-----	40
3.5. Teknik Analisa Data-----	41
<b>4. BAB IV: GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN</b> -----	<b>44</b>
4.1. Gambaran Umum Depkominfo-----	44
4.2. Gambaran Umum Pusat Pengadaan Secara Elektronik (PPE)-----	46
4.3. Visi, Misi dan Kebijakan Mutu Pusat Pengadaan Secara Elektronik--	48
4.4. Sekilas Sistem Aplikasi SePP-----	49
4.5. Modul-modul Aplikasi SePP-----	51
4.6. Kesesuaian penerapan SePP dengan Keppres No. 80 tahun 2003-----	55
4.7. Alur Proses Aplikasi SePP-----	57
4.8. Alur Proses Bisnis Modul e-Lelang-----	59
<b>5. BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> -----	<b>63</b>
5.1. Karakteristik Perusahaan-----	63
5.1.1. Karakteristik Perusahaan Berdasar Jenis Pengadaan-----	63
5.1.2. Karakteristik Perusahaan Berdasar Modal-----	64

5.1.3. Karakteristik Perusahaan Berdasar jumlah Modal-----	65
5.1.4. Karakteristik Perusahaan Berdasar Bentuk Badan Hukum -----	67
5.2. Karakteristik Responden -----	68
5.2.1. Karakteristik Responden Berdasar Jenis Kelamin -----	68
5.2.2. Karakteristik Responden Berdasar Usia-----	68
5.2.3. Karakteristik Responden Berdasar Tingkat Pendidikan-----	69
5.2.4. Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi Penggunaan Internet-----	70
5.2.5. Karakteristik Responden Berdasar Awal Penggunaan Internet-----	71
5.2.6. Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi mengakses SePP-----	72
5.3. Uji Validitas dan Reliabilitas -----	73
5.3.1. Uji Validitas -----	73
5.3.2. Uji Reliabilitas -----	79
5.4. Analisis Evaluasi Penerapan SePP-----	83
<b>6. BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN-----</b>	<b>99</b>
6.1. Kesimpulan -----	98
6.2. Saran-----	99
<b>DAFTAR PUSTAKA-----</b>	<b>100</b>



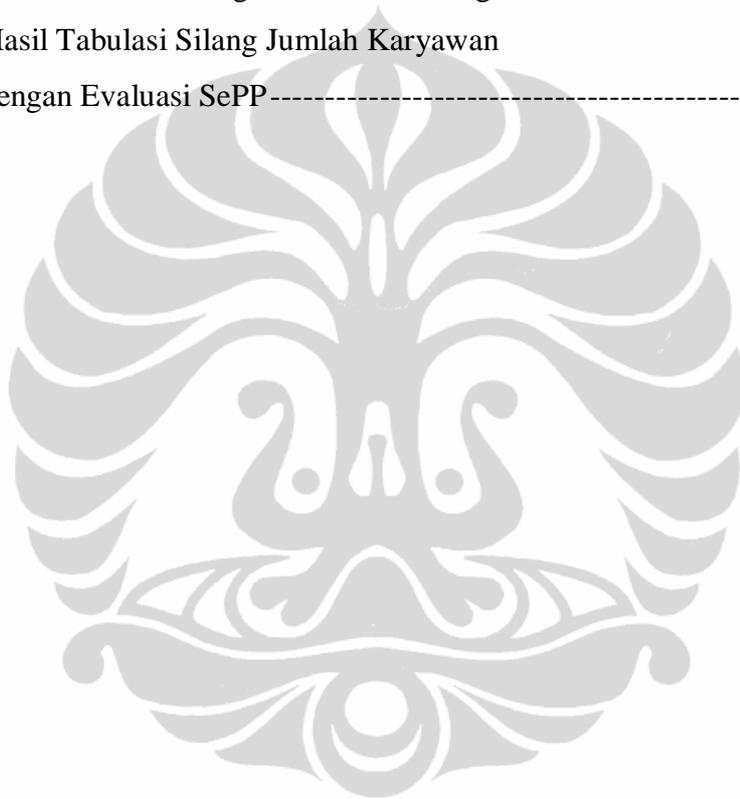
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Dasar Transformasi Data Menjadi Informasi-----	15
Gambar 2.2. Komponen-Komponen Sistem Informasi -----	17
Gambar 2.3. Aliran Proses E-Procurement -----	26
Gambar 2.4. Evaluasi Penerapan SePP dilihat dari Perspektif Good Governance -----	35
Gambar 2.5. Proses penelitian -----	42
Gambar 4.6. Struktur Organisasi Depkominfo -----	45
Gambar 4.7. Struktur organisasi PPE -----	47
Gambar. 4.8. Halaman awal aplikasi SePP -----	49
Gambar 4.9. Modul Utama SePP -----	52
Gambar 4.10. Modul Pendukung SePP -----	53
Gambar 4.11. Proses Bisnis SePP -----	58
Gambar 4.12. Bagan Proses e-lelang -----	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tahapan Pengadaan dan Modus Penyimpangan-----	3
Tabel 2.2. Pengaruh E-Government Terhadap Good Governance-----	34
Tabel 2.3. Operasionalisasi Konsep-----	38
Tabel 4.4. Kesesuaian Keppres 80/2003 dengan Aplikasi SePP-----	55
Tabel 5.5. Karakteristik Perusahaan Berdasar Jenis Pengadaan-----	63
Tabel 5.6. Karakteristik Perusahaan Berdasar Jenis Modal-----	64
Tabel 5.7. Karakteristik Perusahaan Berdasar Skala Modal Uang-----	65
Tabel 5.8. Karakteristik Perusahaan Berdasar Jumlah Karyawan-----	66
Tabel 5.9. Karakteristik Perusahaan Berdasar Bentuk Badan Hukum-----	67
Tabel 5.10. Karakteristik Responden Berdasar Jenis Kelamin-----	68
Tabel 5.11. Karakteristik Responden Berdasar Usia-----	69
Tabel 5.12. Karakteristik Responden Berdasar Tingkat Pendidikan-----	70
Tabel 5.13. Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi Penggunaan Internet-----	71
Tabel 5.14. Karakteristik Responden Berdasar Awal Penggunaan Internet-----	71
Tabel 5.15. Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi Akses SePP-----	72
Tabel 5.16. Uji Validitas Dimensi Efisiensi-----	74
Tabel 5.17. Uji Validitas Dimensi Akuntabilitas-----	75
Tabel 5.18. Uji Validitas Dimensi Responsivitas-----	76
Tabel 5.19. Uji Validitas Dimensi Transparansi-----	77
Tabel 5.20. Uji Validitas Dimensi Partisipasi-----	78
Tabel 5.21. Uji Reliabilitas Dimensi Efisiensi-----	79
Tabel 5.22. Uji Reliabilitas Dimensi Akuntabilitas-----	80
Tabel 5.23. Uji Reliabilitas Dimensi Responsivitas-----	81
Tabel 5.24. Uji Reliabilitas Dimensi Transparansi-----	82
Tabel 5.25. Uji Reliabilitas Dimensi Partisipasi-----	83
Tabel 5.26. Modus Indikator Efisiensi-----	84
Tabel 5.27. Modus Indikator Akuntabilitas-----	85
Tabel 5.28. Modus Indikator Responsivitas-----	87
Tabel 5.29. Modus Indikator Transparansi-----	88

Tabel 5.30. Modus Indikator Partisipasi -----	89
Tabel 5.31. Variabel Penerapan SePP-----	90
Tabel 5.32. Statistik Deskriptif Tiap Dimensi-----	91
Tabel 5.33. Hasil Tabulasi Silang Kategori Perusahaan dengan Evaluasi SePP -----	93
Tabel 5.34. Hasil Tabulasi Silang Jenis Perusahaan dengan Evaluasi SePP -----	94
Tabel 5.35. Hasil Tabulasi Silang Skala Modal dengan Evaluasi SePP-----	95
Tabel. 5.36. Hasil Tabulasi Silang Jumlah Karyawan dengan Evaluasi SePP-----	96



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah, sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat luas, tengah berupaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis, salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bagian kegiatan pemerintah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), sehingga penyelenggaraannya harus diupayakan secara efektif dan efisien. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Tujuan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah dimana pihak pemerintah sebagai pengguna agar memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dari penyedia (*supplier*) melalui metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kedua belah pihak tunduk pada etika dan norma hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku (Suherman 2010).

Menurut Suherman (2010) pengadaan barang dan jasa memiliki arti penting, pertama, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri, kedua, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi, ketiga, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong

efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan *good governance*, dan keempat, bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

Mengingat besarnya nilai pengadaan barang dan jasa, hampir 60% pengeluaran belanja negara digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, dan kontribusinya pada perekonomian negara serta banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka perwujudan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik mutlak diperlukan karena akan berdampak luas pada perubahan perilaku, baik di tingkat birokrasi maupun para pelaku usaha serta masyarakat pada umumnya.

Prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut, seringkali dirasakan bagai buah simalakama oleh para pengelola program pengadaan barang dan jasa. Pada satu sisi, pengelola program dituntut menjalankan perannya sesuai dengan peraturan. Satu sisi lainnya, desakan target waktu realisasi dan alasan efisiensi dan efektivitas proyek sering kali tidak memungkinkan untuk melewati seluruh prosedur yang telah ditetapkan, apalagi jika turunnya anggaran sudah pada pertengahan atau menjelang akhir tahun anggaran. Akibatnya pengadaan barang dan jasa pemerintah sering dilakukan dengan tidak transparan dan tidak dilakukan sesuai prosedur dengan berbagai alasan yang menyertainya, sehingga pengadaan barang dan jasa seringkali menjadi lahan yang subur bagi para pelaku korupsi.

Berbagai modus penyimpangan dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut, menurut Suherman (2010), antara lain:

Tabel 1.1  
Tahapan Pengadaan dan Modus Penyimpangan

NO	TAHAPAN	PENYIMPANGAN
1.	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggelembungan anggaran (mark up)</li> <li>• Rencana pengadaan yang diarahkan</li> <li>• Rekayasa pemaketan untu KKN</li> <li>• Penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis</li> </ul>
2.	Pembentukan panitia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panitia tidak transparan</li> <li>• Integritas panitia lemah</li> <li>• Panitia yang memihak</li> <li>• Panitia tidakindependen</li> </ul>
3.	Prakualifikasi perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen administratif tidak memenuhi syarat</li> <li>• Dokumen administratif “aspal”</li> <li>• Legislasi dokumen tidak dilakukan</li> <li>• Evaluasi tidak sesuai kriteria</li> </ul>
4.	Penyusunan dokumen lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesifikasi yang diarahkan</li> <li>• Rekayasa kriteria evaluasi</li> <li>• Dokumen lelang tidak standar</li> <li>• Dokumen lelang tidak lengkap</li> </ul>
5.	Pengumuman lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumuman lelang yang semu dan fiktif</li> <li>• Jangka waktu pengumuman terlalu singkat</li> <li>• Pengumuman lelang tidak lengkap</li> </ul>
6.	Pengambilan dokumen lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (inkonsisten)</li> <li>• Pendistribusian dokumen terbatas</li> <li>• Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari</li> </ul>
7.	Penyusunan HPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran nilai HPS ditutup tutupi</li> <li>• Penggelembungan (mark up) untuk KKN</li> <li>• Harga dasar yang tidak standar</li> <li>• Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan</li> </ul>
8.	Penjelasan (aanwijzing)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prebid meeting yang terbatas</li> <li>• Informasi dan diskripsi terbatas</li> <li>• Penjelasan yang kontroversial</li> </ul>

NO	TAHAPAN	PENYIMPANGAN
9.	Penyerahan dan pembukaan penawaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran</li> <li>• Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat</li> <li>• Penyerahan dokumen fiktif</li> <li>• Ketidaklengkapan dokumen penawaran</li> </ul>
10.	Evaluasi penawaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria evaluasi cacat penggantian dokumen</li> <li>• Evaluasi tertutup dan tersembunyi</li> <li>• Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi</li> </ul>
11.	Pengumuman calon pemenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumuman sangat terbatas</li> <li>• Tanggal pengumuman sengaja ditunda</li> <li>• Pengumuman yang tidak informatif</li> </ul>
12.	Sanggahan peserta lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak seluruh sanggahan ditanggapi</li> <li>• Substansi sanggahan tidak ditanggapi</li> <li>• Sanggahan performa untuk menghindari tuduhan tender diatur</li> <li>• Panitia kurang akuntabel dan independen</li> </ul>
13.	Penunjukan pemenang lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat penunjukan yang tidak lengkap</li> <li>• Surat penunjukan sengaja ditunda pengeluarannya</li> <li>• Surat penunjukan dikeluarkan secara terburu-buru</li> <li>• Surat penunjukan yang tidak sah</li> </ul>
14.	Penandatanganan kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandatanganan kontrak yang kolutif</li> <li>• Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda</li> <li>• Penandatanganan kontrak yang tertutup</li> <li>• Penandatanganan kontrak yang tidak sah</li> </ul>
15.	Penyerahan barang dan jasa pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualifikasi barang tidak sesuai dengan spesifikasi</li> <li>• Pemenang lelang mensubkontrakkan pekerjaan</li> <li>• Volume barang tidak sama dengan yang tertulis dalam dokumen lelang</li> <li>• Jaminan pasca jual palsu</li> </ul>

Sumber: Bappenas, 2007

Hasil kajian Pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang berjudul “*Country Procurement Assesment Report (CPAR)*” tahun 2001, menyebutkan 10%-50% pengadaan barang dan jasa

mengalami kebocoran, dan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mayoritas dari 80% kasus tindak pidana korupsi terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa.

Dampak yang ditimbulkan dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat ini antara lain: pertama, profesionalisme pengusaha pengadaan barang dan jasa tidak berkembang, penyebabnya antara lain karena rata-rata pekerjaan yang didapatkan tidak lewat kompetisi yang murni, misalnya lewat *backing*, praktik percaloan proyek atau lewat penjatahan. Kedua, mutu pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan, rata-rata pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan tidak mempunyai umur yang panjang, terutama pada sektor konstruksi, hal ini disebabkan karena antara lain pengusaha mengejar keuntungan yang terlalu besar, karena adanya kompensasi yang harus diberikan kepada pejabat-pejabat politik dan pihak pemerintah yang terlibat menyebabkan pengusaha mengambil keuntungan yang cukup besar. Ketiga, tingkat korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa cukup tinggi.

*Tool kit* Anti Korupsi, yang telah dikembangkan pada awal tahun 2002 oleh badan PBB di bawah naungan *Centre of international Crime Prevention* (CIPC) dari *UN Office for Drug Control and Crime Prevention* (UNODCCP) telah mempublikasikan 10 bentuk korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, antara lain: Pemalsuan (*fraud*), penyuapan (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), pemberian komisi (*commission*), pemerasan (*extortion*), pilih kasih (*favoritien*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), bisnis orang dalam (*insider trading*), nepotisme (*nepotism*), sumbangan ilegal (*illegal contribution*). Pada level perencanaan pengadaan barang dan jasa modus korupsi yang sering terjadi adalah *mark-up* dan *mark-down*.

Pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat ini, menurut Sutedi (2008), dapat mengakibatkan: 1). inefisiensi, dimana secara umum, proses pengadaan barang dan jasa belum dapat menghasilkan harga yang kompetitif, dimana harga barang dan jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan barang dan jasa cenderung lebih tinggi dibandingkan pembelian langsung/harga pasar, 2).

Lemahnya daya saing nasional, pelaksanaan pengadaan yang tidak efisien dan iklim usaha yang tidak sehat (KKN) menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga harga tidak kompetitif, yang pada akhirnya menyebabkan belanja publik tidak cukup mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan, 3). Pendekatan yang protektif, ditunjukkan dengan banyaknya pembatasan dalam keikutsertaan dunia usaha dalam pengadaan seperti penggolongan penyedia barang dan jasa, pembatasan wilayah operasi berdasar golongan usaha dan pembidangan usaha yang kaku, dan sebagainya.

Dari berbagai macam bentuk ketidakberesan dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah disebutkan di atas, perlu dilakukan suatu upaya perubahan untuk mencegah/mengurangi korupsi yang terjadi secara struktural di lingkungan pemerintahan. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Apabila pada tahap awal pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan jual beli langsung di suatu tempat (pasar), saat ini pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara tidak langsung, salah satunya dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dapat dilakukan dan berlaku dimana saja. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan mendorong setiap instansi pemerintah untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan istilah *electronic government (e-government)* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Salah satu bagian dari penerapan *e-government* adalah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang biasa dikenal dengan istilah pengadaan elektronis atau *e-procurement*.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*) telah diamanatkan dalam Keppres 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada lampiran I Bab IV point D, Pengadaan Barang/Jasa dengan *E-Procurement*, sebagai berikut “Dalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat

menggunakan sarana elektronik (*internet, Electronic Data Interchange* dan *e-mail*). Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa tujuan dilaksanakannya *e-Procurement* adalah:

- a. memudahkan *sourcing*, proses pengadaan, dan pembayaran;
- b. komunikasi *on-line* antara *buyers* dengan *vendors*;
- c. mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan;
- d. menghemat biaya dan mempercepat proses.

Di Indonesia, *e-procurement* mendapat perhatian setelah terbit Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Adanya Keppres ini merupakan langkah penting dari sisi hukum, terkait dengan status hukum dari *e-procurement* beserta dokumen-dokumen yang terkait termasuk di dalamnya tanda tangan digital.

Sejalan dengan program pemerintah dalam percepatan pemberantasan korupsi disegala bidang sebagaimana telah diatur dalam Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana salah satu sumber korupsi adalah pada pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah, penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dianggap sangat perlu untuk dilakukan melalui proses secara elektronik (*e-Procurement*) yang dapat menghindari/meniadakan praktek kolusi, korupsi dan kecurangan dengan harapan dapat lebih transparan dan tidak diskriminatif, dapat bersaing secara kompetitif sehingga dapat meminimalisasi tindak korupsi yang terjadi serta mendapatkan hasil yang maksimal.

Lina Wu dari Washington D.C, dalam makalahnya yang berjudul *Due Diligence Tools for Procurement* (Sutedi, 2008), mengatakan modernisasi proses pengadaan (*procurement*) merupakan suatu keharusan saat ini, karena memiliki manfaat yang besar, diantaranya untuk memperoleh harga yang lebih murah (*low price*), kualitas barang dan jasa yang lebih baik (*high quality*), dan dapat mengurangi kecurangan, kolusi dan korupsi sehingga kebocoran anggaran negara dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dihindari.

Dalam upaya untuk memperbaiki kualitas pengadaan barang dan jasa, dan sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Inpres Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kebijakan Perekonomian Menjelang dan sesudah IMF dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada tahun 2005 telah mengoperasikan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik berbasis *web/internet (e-procurement)* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yaitu dengan membentuk layanan yang dinamakan “Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP)” yang dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun daerah tanpa dipungut biaya.

SePP ini dilaksanakan oleh Pusat Pengadaan Elektronik (PPE) yang pada awalnya berada di bawah Direktorat *E-Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, namun dengan adanya kebijakan pimpinan di Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, saat ini SePP berada di lingkungan Direktorat *e-Bussiness*, namun tetap berada di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika.

Diterapkannya SePP ini ditujukan sebagai solusi mewujudkan *good governance* dengan manfaat antara lain untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan, meningkatkan efektivitas & efisiensi dalam hal biaya, waktu dan pengendalian terhadap pengeluaran, mendukung tercapainya kompetisi yang lebih berkualitas dan sehat, meningkatkan proses monitoring dan pelaporan, peningkatan kapasitas institusi pemerintah (pembeli/pengguna barang/jasa) dan supplier (penjual/penyedia barang/jasa), penyederhanaan proses/*workflow* dan pengurangan *paperwork*, dan peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam penyelenggaraan *e-procurement*.

Sistem pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi (*e-Procurement*) yang diterapkan tersebut telah memenuhi regulasi nasional yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan ketentuan internasional dimana pada tanggal 5 Agustus 2005 SePP telah

menerima penghargaan sebagai *Top 3 Best E-Practise* dari *APEC Digital Opportunity Center* (ADOC) di Taipei.

Keberadaan SePP ini telah disosialisasikan kepada seluruh instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 06/SE/M.KOMINFO/12/2005 tentang Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang berbasis *Web/Internet* (*e-Procurement*) atau SePP : Sistem *e*-Pengadaan Pemerintah.

Sampai dengan saat ini terdapat 8 (delapan) instansi pemerintah yang telah terdaftar sebagai pengguna SePP, yaitu : Otorita Batam, Pemda Provinsi NTB, Peruri, Taspen, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, KPK dan Depkominfo sendiri.

Di lingkungan Depkominfo sendiri SePP ini secara resmi mulai diterapkan secara internal pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/06/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Secara Elektronik dengan Sistem *e*-Pengadaan Pemerintah di lingkungan Depkominfo dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkominfo kepada para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Depkominfo Nomor: 9/SE/SJ/KOMINFO/06/2008 perihal Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Depkominfo Tahun Anggaran 2008.

Dengan diterapkannya SePP menunjukkan kesungguhan Depkominfo dalam upaya melakukan perbaikan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Depkominfo dalam rangka mewujudkan penerapan *good governance* di lingkungan Depkominfo.

Penerapan SePP di lingkungan Depkominfo merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan yang merupakan refleksi dari perwujudan *good governance* serta merupakan salah satu pembaharuan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*) dalam hal pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*).

## 1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

”Bagaimana evaluasi penerapan SePP dilihat dari perspektif *good governance* di Departemen Komunikasi dan Informatika?”

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penerapan SePP dilihat dari perspektif *good governance* di Departemen Komunikasi dan Informatika.

## 1.4. Signifikansi Penelitian

- a. Secara Akademis, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan mengenai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan dengan melalui *e-procurement* dengan penerapan Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dilihat dari perspektif *good governance*.

Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi sekaligus masukan bagi penelitian selanjutnya dalam hal yang sama.

- b. Manfaat praktis, sebagai gambaran proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan/pedoman terutama oleh instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## 1.5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada penerapan Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) di lingkungan Unit Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika, meskipun SePP saat ini telah dipergunakan secara aktif oleh 7 (tujuh) instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini disajikan dalam 6 (enam) Bab sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian yang akan diselesaikan, tujuan dilakukan penelitian, signifikansi penelitian, keterbatasan penelitian dan sistematika penelitian yang dilakukan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Diantaranya teori sistem informasi, teori *e-government*, teori *e-procurement* dan teori *good governance*.

Selain itu juga menggambarkan alur pikir dari penelitian yang akan dilakukan.

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab metodologi penelitian, akan menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, teknik penarikan sampel, alat pengumpul data, dan teknik analisis data yang akan digunakan serta deskripsi operasional variabel penelitian.

### BAB IV : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Berisi gambaran umum dari Departemen Komunikasi dan Informatika, terutama mengenai penerapan Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

### BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis data yang didapat dari hasil kuesioner yang diolah dengan berpedoman pada teori-teori yang terkait sehingga diperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan pada Bab I.

### BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang dilakukan sebagai jawaban dari pertanyaan dalam penelitian ini.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan tema pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*), antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kurniaty yang mengambil judul “Pelaksanaan *e-procurement* sebagai pendukung penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN (studi kasus pada Divisi Multimedia PT. Telekomunikasi Indonesia). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa *e-procurement* yang dilaksanakan pada Divisi Multimedia PT. Telekomunikasi Indonesia termasuk tipe relasi G2B dan implementasinya sudah baik dalam rangka mendukung penerapan *Good Corporate Governance* pada divisi tersebut. Dalam kesimpulan penelitian dijelaskan bahwa terdapat tiga tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapan *e-procurement*, yaitu tantangan dalam peningkatan kemampuan dari para supplier/vendor khususnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi; merubah manajemen internal, khususnya masalah sosialisasi internal; dan penyiapan prosedur dan peraturan yang berlaku serta penyiapan anggaran dapat diatasi jika terdapat komitmen yang besar dari seluruh pihak dalam organisasi yang terlibat penerapan *e-procurement* serta didukung oleh *leadership* dari *Top management*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Devina Soraya yang berjudul ”Analisis Pelaksanaan *e-procurement* pada Direktorat Jenderal Cipta Karya (Analisis kasus pada satuan kerja non vertikal tertentu penataan bangunan dan lingkungan Provinsi DKI Jakarta)”. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui studi lapangan dan studi literatur/studi kepustakaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *e-procurement* pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penataan Bangunan dan Lingkungan DKI Jakarta Direktorat Jenderal Cipta Karya dan kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan *e-procurement*. Hasil penelitian menyebutkan

bahwa pelaksanaan *e-procurement* pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penataan Bangunan dan Lingkungan DKI Jakarta berada pada tahap pelaksanaan semi *procurement*, dimana pada tahap ini sebagian proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara konvensional dan sebagian lagi dilakukan secara elektronik. Proses pelaksanaan *e-procurement* Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penataan Bangunan dan Lingkungan DKI Jakarta telah berjalan baik, karena keseluruhan proses pelaksanaannya benar-benar mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kendala yang dihadapi antara lain karena adanya keterbatasan anggaran, kesulitan mengakses website DPU dan fasilitas sistem aplikasi *e-procurement* yang kurang responsif.

Penelitian yang dilakukan saat ini merupakan penelitian tentang penerapan *e-procurement* melalui Sistem e-Pengadaan Pemerintah yang diterapkan di lingkungan Depkominfo. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sebelum diterapkannya SePP dan sesudah penerapan SePP serta bagaimana kinerja SePP dilihat dari perspektif *good governance*.

Berdasar penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya meskipun dengan topik yang sama. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini.

### **2.1.1.Sistem Informasi**

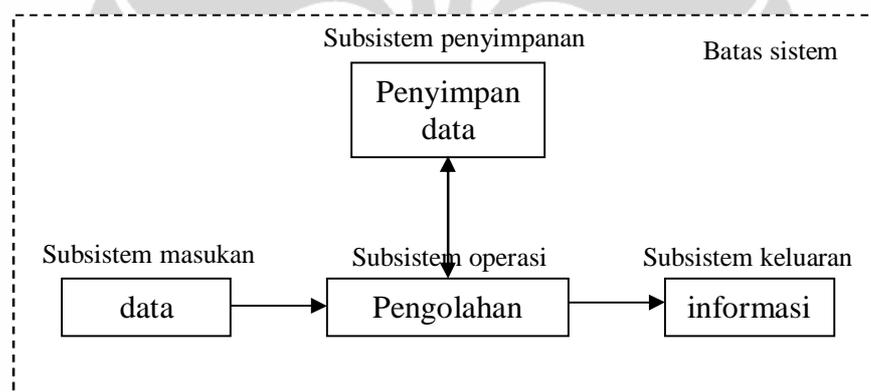
Banyak pendapat tentang sistem informasi yang dikemukakan oleh para ahli. Sebelum kita mendefinisikan tentang sistem informasi, terlebih dulu harus kita jelaskan apa arti dari informasi dan juga sistem. Menurut Wahyudi Kumorotomo (2004), Informasi merupakan data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat untuk dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan. Informasi ini dipergunakan bagi setiap anggota dalam organisasi dalam proses penentuan keputusan sesuai dengan tujuan atau sasaran organisasi yang akan dicapai.

David Kroenke dan Richard Hatch (1994) menyebutkan bahwa informasi adalah pengetahuan yang diperoleh dari data. Sedangkan data adalah fakta atau penggambaran yang terekam.

*“Information is knowledge derived from data. Data, in turn, is defined as recorded facts or figures. Information is data placed within a context. Information is the amount of uncertainty that is reduced when a message is received.”*

David dan Olson (1987) menjelaskan transformasi data menjadi informasi dalam suatu sistem informasi sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Model Dasar Transformasi Data Menjadi Informasi  
dalam suatu Sistem Informasi



Sumber: Gordon B. Davis, Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen, Jakarta:IPPM, 1987.

Untuk dapat menjadi informasi, data harus diproses atau diolah terlebih dahulu. Subsistem masukan yang berupa data kemudian diolah dalam subsistem pengolahan untuk dijadikan informasi dalam subsistem keluaran. Dalam subsistem operasi dilakukan juga penyimpanan data dalam subsistem penyimpanan.

Menurut Davis (1995) sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tak teratur, tetapi terdiri dari unsur yang dapat dikenal dan saling melengkapi karena satu maksud, tujuan atau sasaran.

Konsep sistem menurut O'Brien (2003) yang mendasari bidang sistem informasi adalah suatu kombinasi orang-orang, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi (*network*), dan sumber daya data yang terorganisir yang bertujuan mengumpulkan, mengubah bentuk dan menyebar informasi tersebut di suatu organisasi. Jadi, menurut O'Brien dalam sebuah sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan yang digunakan untuk memproses informasi menjadi sebuah kebutuhan bagi organisasi. Keseluruhan komponen tersebut saling mempengaruhi proses penyampaian informasi. Untuk dapat memahami lebih jauh tentang bagaimana konsep sistem informasi bekerja, maka harus diperhatikan aktivitas dan komponen yang terlibat dalam proses konsep sistem informasi tersebut. Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti:

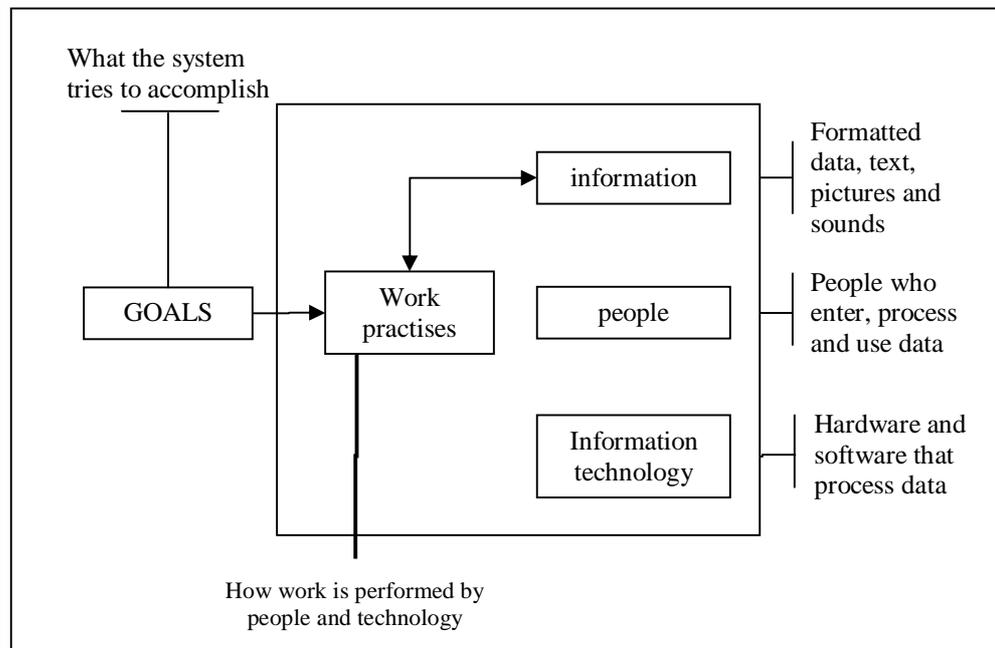
- Perangkat keras (*hardware*), yang mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer dan printer;
- Perangkat lunak (*software*) atau program, yang merupakan sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data;
- Prosedur, sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki;
- Orang, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi;
- Basis data (*database*) sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data;
- Jaringan komputer dan komunikasi data, merupakan sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Sistem Informasi menurut Suwardi (2006) adalah kumpulan prosedur, mesin dan orang yang mendapatkan, mengolah, serta menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Irwin (1994) sistem informasi didefinisikan sebagai komponen-komponen yang telah diatur dan terintegrasi untuk mencapai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi.

Kroenke (1994) menjelaskan bahwa sistem informasi bermanfaat dalam memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif yang tentu sangat berguna bagi kegiatan bisnis.

Pengertian sistem informasi oleh Alter (2003) digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2.  
Komponen-Komponen Sistem Informasi



Sumber: Pengenalan Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi, 2003

Sistem informasi dijelaskan sebagai sekumpulan informasi, orang dan teknologi informasi yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dari keseluruhan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan sekumpulan komponen-komponen yang saling terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam mencapai tujuan pengambilan keputusan.

### 2.1.2. *E- Government*

Banyak pihak memahami *E-Government* dalam konteks yang sempit, sekedar instansi pemerintah memiliki situs internet (*website*) maka sudah dikatakan instansi tersebut telah menerapkan *E-Government*. Di pihak lain ada yang berpendirian bahwa instansi pemerintah telah menerapkan *E-Government* bila telah memanfaatkan aplikasi telematika secara menyeluruh, tidak hanya sekedar memiliki *website* saja.

Terlepas dari dua pemikiran yang berbeda tersebut, esensi yang terpenting dari *E-Government* menurut Sutedi (2009,209) adalah pemanfaatan telematika untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, dimana peningkatan kinerja instansi pemerintah tersebut tidak hanya diartikan dalam konteks yang sempit, namun dapat meliputi tercapainya tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan transparan, baik dalam pengelolaan internal maupun dalam pelayanan kepada publik. Tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan transparan merupakan indikator dari rendahnya tingkat korupsi di lingkungan birokrasi.

Pada awal pembentukannya, *e-government* lebih ditekankan sebagai instrumen dalam proses administrasi. Dalam perkembangannya, *e-government* dapat memberikan transformasi terhadap struktur, proses, dan fungsi dari suatu organisasi.

Menurut Setiyadi (2006) penerapan *e-government* tidak hanya sekedar tampil di internet, lebih dari itu penerapan *e-government* harus dapat memberikan perubahan radikal di dalam sistem dan tata laksana pemerintahan yang menuntut teladan kepemimpinan, kesediaan merubah paradigma, berani bertindak transparan, dan semua itu bukan sekedar untuk melayani kepentingan publik semata, tetapi mencakup kepentingan yang lebih luas yaitu sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (*good governance*).

Secara umum, salah satu komponen utama *e-government* adalah aplikasi sistem informasi pemerintahan yang mampu memberikan layanan secara *online* melalui media internet. Aplikasi ini memberi fasilitas interaksi antara anggota masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik tanpa harus bertatap muka secara langsung. Berkurangnya tatap muka ini diharapkan dapat mengurangi peluang kongkalikong yang menjurus kepada kesepakatan untuk melakukan korupsi.

Indrajit (2002) menyatakan bahwa konsep mengenai *e-government* sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa hal, yaitu:

1. sebagai sebuah konsep *e-government* memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap Negara memiliki skenario implementasi atau penerapan yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup *e-government* pun menjadi beraneka ragam;
2. spektrum implementasi aplikasi *e-government* sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah Negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi;
3. pengertian dan penerapan *e-government* di sebuah Negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari Negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi dari Negara yang bersangkutan;
4. visi, misi dan strategi pembangunan sebuah Negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.

Meskipun ada berbagai definisi mengenai *e-government*, inti dari *e-government* sendiri pada hakikatnya hampir sama. Untuk mengetahui hakikat dari *e-government* perlu dikaji beberapa definisi dari beberapa pendapat pakar, komunitas atau institusi mengenai *e-government*.

Beberapa definisi *e-government* tersebut, antara lain dikemukakan oleh:

1. Holmes (2001), yang mendefinisikan "*Electronic government or E-government, is the use of information technology, in particular the internet, to deliver public services in a much more convenience, customer-oriented, cost-effective, and all together different and better way.*"

2. The World Bank Group mendefinisikan *E-Government* sebagai:

(1) *E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.*

(2) *Electronic government, or "e-government," is the process of transacting business between the public and government through the use of automated systems and the Internet network, more commonly referred to as the World Wide Web. ( [www.cert.or.id](http://www.cert.or.id), 2001).*

Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa *e-government* merupakan suatu teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan kalangan bisnis dan pihak lainnya yang terkait dengan pemerintah.

3. Scott A. Taylor (2004) mendefinisikan *e-government* secara luas, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan pelayanan, dan untuk mengelola system pemerintahan, dengan harapan *e-government* akan mampu memperbaiki pemerintah melalui partisipasi masyarakat, pelayanan pemerintah yang lebih baik, manajemen yang lebih efisien, pengurangan korupsi, lebih transparan, meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya
4. Marcin Sakowicz (2004), mendefinisikan *e-government* sebagai penggunaan teknologi komunikasi dan informasi oleh pemerintah untuk mentransformasikan pemerintahannya dengan membuat semakin mudah diakses, efisien dan akuntabel.

Pada intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Secara lebih luas *e-government* diartikan sebagai upaya untuk melakukan transformasi pemerintahan. *E-government* dipandang sebagai suatu bentuk transformasi hubungan baru antar berbagai pihak terutama pihak masyarakat, sektor bisnis dan pihak pemerintah sendiri.

Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business Enterprises*), dan G2G (*Government to Government/inter-agency relationship*), sebagai berikut:

(1) *Government to Government (G2G)*

Tipe hubungan ini merujuk pada hubungan antara organisasi pemerintahan, baik antar departemen maupun antara pemerintahan pusat dan daerah atau dengan pemerintah negara lain.

(2) *Government to Business (G2B)*

Yaitu hubungan antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Sehingga dengan adanya *e-government* pebisnis dapat menghemat waktu dan biaya serta menyederhanakan prosedur-prosedur yang panjang dan berbelit-belit..

(3) *Government to Citizens (G2C)*

Tipe hubungan *government to citizen (G2C)* menunjuk pada hubungan pemerintah dengan warga negara/masyarakat. Hal ini untuk memfasilitasi warga masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah dalam pelayanan sehari-hari. Jadi masyarakat yang hendak mengurus berbagai keperluan di pemerintahan tidak perlu harus mendatangi setiap instansi pemerintah yang dapat melayani sehingga dapat menghemat waktu dan juga biaya yang harus ditanggung masyarakat.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa kesamaan pengertian dari *e-government* yang dapat disimpulkan, yakni pada intinya *e-government* adalah pelayanan pemerintah dengan penggunaan teknologi informasi/berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun menurut Salomo (2002) *e-government* bukan saja teknologi informasi yang dipakai oleh pemerintah untuk kepentingan penyediaan layanan publik, namun lebih dari itu *e-government* juga merupakan alat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembuatan kebijakan.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya *e-government* bagi suatu negara atau daerah menurut Indrajit (2002) adalah sebagai berikut:

1. memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (masyarakat, bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
2. meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *good governance*;
3. mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
4. memberikan peluang kepada pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
5. menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada;
6. memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Menurut *world bank* manfaat penerapan *e-government*, antara lain:

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, *passing grade*, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.

Sedang menurut Ndou, beberapa manfaat dari penerapan *e-government* adalah:

1. *Cost reduction and efficiency gains*, memberikan pelayanan secara *on-line* secara substansial dapat menurunkan biaya operasional dari berbagai kegiatan dibandingkan dengan cara-cara manual.
2. *Quality of service delivery to bussinesses and customers*, dengan diterapkannya *e-government* akan memangkas jalur birokrasi sehingga menciptakan transaksi yang nyaman, aman serta tingkat kemudahan akses yang tinggi.
3. *Transparency, antycorruption and accountability*, dengan *e-government* akan mendukung terjadinya proses transparansi dalam proses pembuatan keputusan.
4. *Increase the capacity of government*, Intranet memungkinkan bagian atau departemen yang berbeda saling tukar informasi dan data sehingga aliran informasi akan lebih cepat serta proses pembuatan keputusan akan lebih cepat dan lebih baik.

5. *Improve the quality of decision making*, dengan terciptanya komunitas, forum serta interaksi dan komunikasi yang terus menerus antara pemerintah dan warga negara akan memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.
6. *Network and Community Creation*, dengan teknologi informasi menimbulkan kesempatan terhadap pembangunan jaringan dan komunitas.
7. *Promote use of ICT in other sectors of the society*, bahwa interaksi dan komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan stakeholder-nya menyumbang pembentukan pemahaman mengenai potensi teknologi informasi yang dapat disumbangkan bagi kegiatan masyarakat.

### **2.1.3. E- Procurement**

Berkaitan dengan tipe relasi yang telah disebutkan di atas, khususnya Tipe Relasi G2B (*Government to Bussiness*), terdapat turunan dari aplikasi *e-government*, yaitu *e-procurement*. Hal ini sejalan dengan pendapat Budi Rahardjo (2001), bahwa *e-government* dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, antara lain: penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat, penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum, dan *e-procurement*, dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line dan transparan.

Vaidya dan Sajeev (2006) menjelaskan pengertian *e-procurement* mengacu pada pemanfaatan internet berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membantu individu dan keseluruhan tingkatan proses pengadaan barang dan jasa/proses *e-procurement*, yang meliputi pencarian, negosiasi, pemesanan, penerimaan, dan evaluasi pembelian .

*“E-procurement refers to the use of internet-based (integrated) information and communications technologies (ICTs) to carry out individual or all stages of the procurement process including search, sourcing, negotiation, ordering, receipt, and post-purchase review”*(p, 70).

Menurut Simon dan Alistair (2005), proses *procurement* mencakup kebutuhan identifikasi dan spesifikasi oleh pengguna, melalui tahap pencarian dan negosiasi dalam kontrak dan penempatan pemesanan, yang terdiri dari mekanisme pendaftaran penerimaan, pembayaran dimuka dan evaluasi pendukung.

*“The procurement process encompasses the initial need identification and specification by users, through the search, sourcing and negotiation stage of contracts and order placement and on to include mechanisms that register receipt, trigger payment and support post-supply evaluation”.*

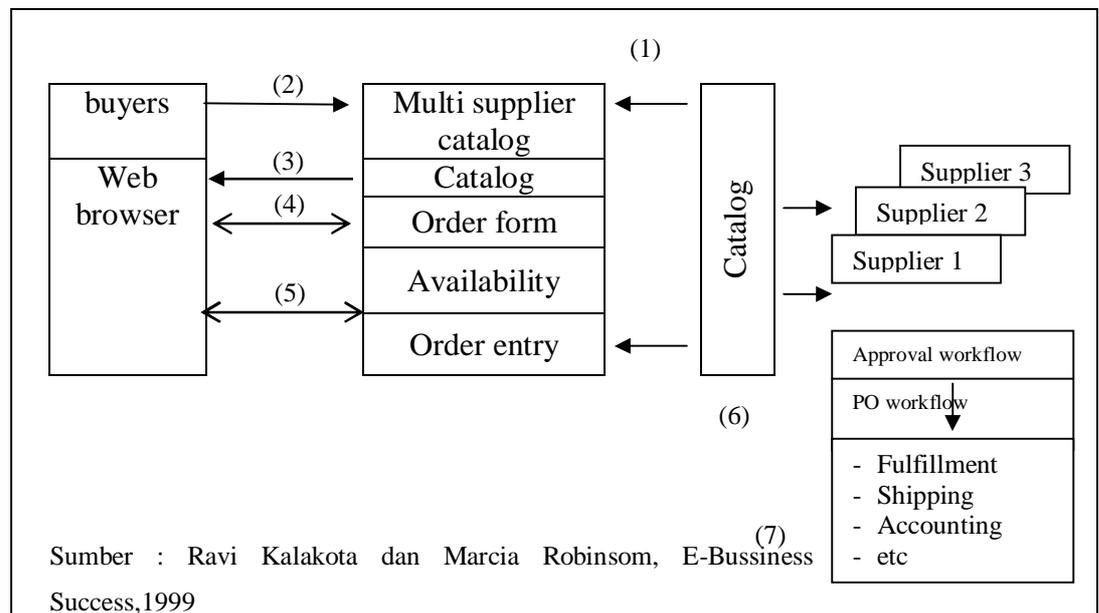
Proses pelaksanaan *e-procurement* terdiri dari beberapa tahap. *E-procurement* merupakan penggunaan metode elektronik pada setiap tahap dalam proses pengadaan barang dan jasa dari mulai tahap identifikasi sampai dengan pembayaran, bahkan sampai pada manajemen kontrak.

Hal-hal yang dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* menurut Ravi Kalakota dan Marcia Robinson (1999,17), yaitu : (1) melakukan pemilihan produk/barang yang akan dibeli, (2) membuat pesanan barang yang akan diorder, disetujui oleh kedua pihak untuk order barang dan harga, dibuatkan purchase order oleh penjual, (3) jadwal pengiriman barang, barang dikirim, barang diterima oleh pembeli, pembayaran dimuka atau setelah barang diterima, dan (4) persetujuan barang telah diterima oleh pembeli, dokumen persetujuan kembali ke penjual.

Secara keseluruhan, proses pengadaan barang dan jasa secara online terdiri dari tahapan aliran dalam aktivitasnya. Aliran proses *e-procurement* menurut Ravi Kalakota dan Marcia Robinson (1999,75), adalah sebagai berikut:

1. *Catalog Management* (manajemen katalog)  
Mengatur seluruh produk yang akan dibeli (daftar dari produk)
2. *Browse Supplier* (melihat atau memilih supplier)
3. *Find product* (menemukan produk yang diinginkan)
4. *Order Item* (pesanan barang sesuai dengan harga, kualitas dari supplier yang diinginkan)
5. *Confirm order* (system dapat digunakan untuk konfirmasi terhadap order yang dipesan secara otomatis)
6. *Transmit Order, Get Information* (system dapat memberikan tanda kepada supplier untuk mengirimkan order, mendapatkan informasi)
7. *Order Complete* (pesanan telah sesuai)

Gambar. 2.3  
Aliran Proses E-Procurement



Keterangan :

- (1) Catalog Management
- (2) Browse Supplier
- (3) Find Product
- (4) Order Item
- (5) Confirm Order
- (6) Transmit Order, Get Information
- (7) Order complete

Chopra et al (2001) mengklasifikasikan *e-procurement* menjadi tiga jenis, transaksi manajemen untuk mengelola daftar permintaan untuk proses pembayaran, broker seperti menggunakan pertukaran elektronik dan e-lelang, dan integrasi elektronik yang mungkin melibatkan sistem informasi bersama dalam rantai pasokan, seperti *Electronic Data Interchange (EDI)* atau berbagi sistem desain dibantu komputer .

Sutedi (2008) menyatakan bahwa *e-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) berbasis internet, yang bertujuan untuk memudahkan *sourcing*, proses pengadaan dan pembayaran; memberikan komunikasi *online* antara *buyers* dengan *vendors*; mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan; menghemat biaya dan mempercepat proses.

Marcos Singer, Garo Konstantinidis, Eduardo Roubik and Eduardo Beffermann (2009) menyebutkan bahwa banyak negara telah menciptakan badan-badan khusus untuk mengembangkan dan mengelola sistem *e-procurement* untuk hubungan G2B (*Government to Bussiness*). Mereka melakukannya untuk mencapai tujuan-tujuan, sebagai berikut:

- a. *Promote the use of Internet across different industries;*
- b. *Give signs of transparency, as the transactions between contractors and State agencies become public;*
- c. *Reduce administrative cost by improving the procurement process; and*
- d. *Reduce purchasing prices, due to a more efficient operation and to a larger number of potential contractors.*

#### **2.1.4. Good Governance**

Banyak yang beranggapan bahwa *governance* adalah sama dengan *government*, sehingga *good governance* otomatis akan tercapai jika ada *good government*. Secara terminologis *governance* berarti pemerintahan, sehingga *governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance* pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.

Menurut Hetifah (2009) konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. Leach & Percy-Smith dalam Hetifah (2009) menyatakan pendapat bahwa *government* mengandung pengertian politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara *Governance* meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan yang “diperintah” . *Governance* juga menunjukkan inklusivitas. Kalau *government* dilihat sebagai “mereka” maka *governance* adalah “kita’.

Lembaga internasional yang mengawali mempopulerkan istilah *governance* adalah Bank Dunia melalui publikasinya yang diterbitkan tahun 1992 berjudul *Governance and Development*. Definisi *governance* menurut Bank Dunia adalah “*the manner in which power is exercised in the management of country’s social and economic resources for development*”. Berdasar konsep dari Asian Development Bank (ADB), yang sejak tahun 1995 telah memiliki *policy paper* yang bertajuk *Governance: Sound Development Management*, dalam kebijakannya ADB mengartikulasikan empat elemen esensial dari *good governance* yaitu *accountability, participation, predictability, dan transparency*. Sementara itu, UNDP dalam *Reconceptualising Governance; Discussion Paper No.2, 1997*) membuat definisi *governance* yang lebih ekspansif, *governance* meliputi tiga elemen yaitu pemerintah, sektor swasta dan *civil-society* serta interaksi antar ketiga elemen tersebut. Dalam dokumen kebijakannya UNDP menyebutkan ciri-ciri *good governance*, yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Penciptaan *good governance* menurut Prasojo (2005), dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, responsivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Inti dari upaya penciptaan *good governance* terletak pada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bukanlah sekedar perubahan struktur dan reposisi birokrasi, tetapi lebih dari itu meliputi perubahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan budaya

birokrat dan masyarakat, serta perubahan mindset dan komitmen pemerintah serta partai politik. Reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah sangat relevan dengan penciptaan *good governance*. Birokrasi pemerintah yang akuntabel memiliki daya tanggap (*responsiveness*) yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu reformasi birokrasi harus diarahkan pada upaya untuk memperbanyak akses informasi kepada masyarakat dalam mengontrol tugas pemerintah. Dengan demikian reformasi birokrasi memiliki hubungan material dengan *good governance* atau metode penciptaan pemerintah yang akuntabel, responsive, transparan dan partisipatif.

Loffler memberikan definisi *good governance* sebagai suatu sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, mengandung kebenaran, adil, demokratis, partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sedangkan oleh Tjokroaminoto, prinsip utama *good governance* disebutkan mencakup sembilan indikator yaitu: partisipasi, penerapan aturan hukum, transparansi, responsif, berorientasi, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategi.

Jelas bahwa jumlah komponen atau prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Dalam hal ini menurut peneliti paling tidak ada sejumlah prinsip yang akan diambil sebagai prinsip utama yang melandasi *good governance*, antara lain: efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

#### 1. Efisiensi

Pada dasarnya pemerintah dituntut untuk menyediakan pelayanan yang baik bagi warganya. Salah satu cara untuk menyediakan layanan yang baik dapat dilakukan melalui penerapan *e-government*. Menurut Setiyadi (2005) penerapan *e-government* tidak hanya terkait dengan otomatisasi layanan, tetapi lebih dari itu terjadi efisiensi dan peningkatan produktivitas yang luar biasa. Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987) yaitu: “Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya”.

Sedangkan pengertian efisiensi menurut SP.Hasibuan (1984) yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah: “Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.”

Peningkatan efisiensi menurut Saidi dan Yared (2001) adalah melalui penurunan biaya dan waktu pelayanan serta penyingkatan proses pelayanan. Dengan demikian masyarakat menjadi semakin mudah dan murah dalam mendapatkan pelayanan publik.

## 2. Akuntabilitas

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (*e-government*) menurut Siallagan (2002) telah mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi, dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Mardiasmo (2001) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Menurut Solihin (2009) indikator minimal dari akuntabilitas adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan perangkat pendukung indikator antara lain: adanya mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pemantauan kinerja, sistem pengawasan dan mekanisme *reward and punishment*.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal berupa pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dan akuntabilitas horizontal berupa pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Sedangkan menurut Steward dalam Ellwood (1993) dikemukakan bahwa akuntabilitas publik sangat kompleks.

Tahapan akuntabilitas dapat dilihat dari kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan.

### 3. Responsivitas

Responsivitas sebagai salah satu indikator pelayanan berkaitan dengan daya tanggap aparatur terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Siagian (2000) dalam pembahasannya mengenai Teori Pengembangan Organisasi mengindikasikan bahwa responsivitas menyangkut kemampuan aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Sehingga birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dilulio, 1994 dalam Dwiyanto (2002), menekankan bahwa responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, dalam studinya tentang reformasi birokrasi, Dwiyanto (2002), mengembangkan beberapa indikator responsivitas pelayanan publik, yaitu : keluhan pengguna jasa, sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan pengguna jasa, penggunaan keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan layanan publik, berbagai tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan, dan penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

### 4. Transparansi

Menurut Yulianto (2005), dalam menyusun sistem dan prosedur pelayanan, birokrasi harus menjelaskan secara tegas dan detil tentang tugas, kewajiban dan wewenang petugas. Demikian juga halnya dengan hak dan kewajiban para pengguna jasa. Dengan demikian masyarakat akan selalu dapat menilai apakah pelaksanaan aturan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

## 5. Partisipasi

Teori partisipasi yang sangat terkenal dikemukakan oleh Arnstein (1982) yang mengemukakan mengenai "ladder of participation"/tangga partisipasi. Teori ini mengategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Menurut teori ini terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian diperinci kembali dalam delapan anak tangga partisipasi. Derajat terendah adalah non partisipasi, derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan pertanda adanya partisipasi dan derajat yang tertinggi adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan yang lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Secara rinci delapan anak tangga tersebut adalah: manipulasi, terpai, pemberian informasi, konsultasi, penentruman, kemitraan, kuasa yang didelegasi dan kendali warga.

### 2.1.5. Implementasi SePP Menurut Perspektif *Good Governance*

Terkait dengan implementasi *e-government* dalam mendukung penerapan *good governance*, banyak negara telah membuktikan keberhasilannya dalam mengimplementasikan *e-government* dalam mendukung *good governance*. Hal ini karena penerapan *e-government* sebagai sarana pelayanan publik telah menghasilkan suatu pelayanan yang transparan, adil (fair), efektif dan dapat mengakomodir partisipasi seluruh warga masyarakat.

Penerapan *e-procurement* dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pengadaan barang dan jasa supaya lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel sehingga mendukung *good governance*. Sutedi (2008) menyatakan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

WGTGP (*Working Group on Transparency in Government Procurement*) dalam laporannya menyebutkan bahwa penerapan prinsip-prinsip transparansi dan nondiskriminasi dalam pengadaan barang dan jasa akan menghasilkan efisiensi dan meningkatkan inovasi; menghasilkan nilai uang yang lebih baik, aturan main yang transparan, membangkitkan investasi domestik dan asing serta kemitraan antara pelaku usaha dalam negeri dan mancanegara, mempunyai efek terhadap pemberantasan korupsi, sebagai kunci dalam *good governance* dan mendasar bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi, serta persetujuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah akan menghasilkan aturan-aturan yang sederhana/*minimum set of applicable rule* (Suherman, 2010).

Sejalan dengan pandangan di atas, Bank Dunia berpendapat bahwa terdapat korelasi yang erat antara baik buruknya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan terciptanya pemerintahan yang baik. Salah satu indikator untuk tercapainya *good governance* adalah pengadaan barang dan jasa yang efisien sebagai elemen penting bagi pemerintahan yang baik dan sebaliknya buruknya pengadaan barang dan jasa pemerintah akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi bagi pemerintah maupun bagi publik (Suherman, 2010).

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah agar efisien dapat dilakukan dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini didukung oleh pendapat Setiyadi (2004) bahwa teknologi informasi telah dibangun untuk mendukung upaya *good governance*.

Implementasi teknologi informasi dalam kaitannya dengan *good governance* dinyatakan oleh Magno dan Serafica (2001), sebagai berikut:

*“ IT promotes good governance in three basic ways: (1) by inceasing transparency, information, and accountability; (2) by facilitating accurate decision making and public participation, and (3) by enhancing the efficient delivery of public goods and services.”*

IT mendukung *good governance* dalam tiga hal mendasar: (1) menaikkan ketransparanan, informasi, dan tanggung-jawab; (2) memfasilitasi pengambilan keputusan yang akurat dan keikutsertaan publik, dan (3) penyerahan barang dan jasa publik yang efisien.

Long dalam Hill (2004) berpendapat bahwa penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dapat dipertimbangkan dalam membangun konsep *good governance*. Lebih lanjut dikatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* seperti: hubungan dalam pembuatan dan koordinasi suatu kebijakan, demokrasi partisipasi dalam pembuatan kebijakan, konsistensi, efektifitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan, serta transparansi dan keterbukaan dalam keseluruhan proses pembuatan kebijakan dapat diimplementasikan dengan *e-government*.

Dalam kaitannya dengan proses pengambilan kebijakan publik serta dalam kaitannya antara *e-government* dan *good governance*, Leitner (2003) memberikan gambaran hubungan keduanya sebagai berikut:

Tabel 2.2.  
Pengaruh *e-government* terhadap *good governance*

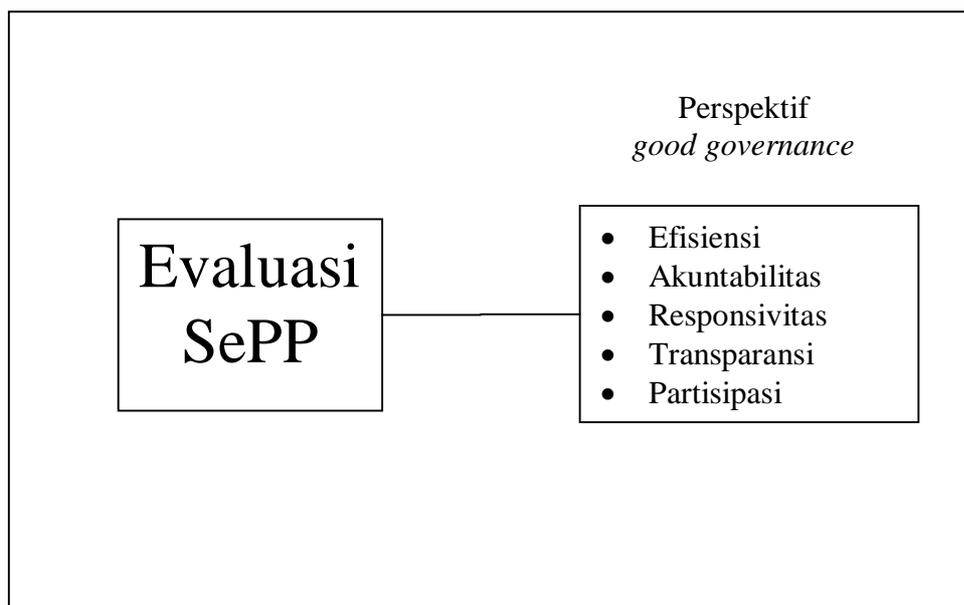
Prinsip <i>good governance</i>	Pengaruh <i>e-government</i>
Koordinasi dalam penyusunan kebijakan	Memungkinkan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan publik untuk berkoordinasi dengan mudah
Demokrasi partisipasi dalam pembuatan kebijakan	Memungkinkan <i>stakeholder</i> terlibat dalam pengambilan keputusan
Konsistensi, efektifitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan	Memfasilitasi kerja sama dan pembentukan <i>network</i> sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah
Transparansi dan keterbukaan dalam keseluruhan proses kebijakan	Informasi secara luas dapat diakses dengan mudah

Sumber: Leitner (2003)

## 2.2. MODEL ANALISIS

Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel saja, yaitu penerapan SePP yang dilihat menurut perspektif *good governance*, sehingga model analisisnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2.4.  
Evaluasi Penerapan SePP dilihat dari perspektif *good governance*



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan SePP akan dievaluasi berdasarkan 5 (lima) indikator *good governance* yaitu: efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi.

## 2.3. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Berdasar pendapat Magno dan Serafica yang menyatakan bahwa:

*“ IT promotes good governance in three basic ways: (1) by inceasing transparency, information, and accountability; (2) by facilitating accurate decision making and public participation, and (3) by enhancing the efficient delivery of public goods and services.”*

Dan pendapat Setiyadi (2004) bahwa teknologi informasi telah dibangun untuk mendukung upaya *good governance*, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “ Penerapan SePP mendukung pelaksanaan *good governance* di Depkominfo.”

#### 2.4. OPERASIONALISASI KONSEP

Dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) variabel yaitu penerapan SePP menurut perspektif *good governance* berdasar konsep dari Magno dan Serafica sebagai berikut:

*“ IT promotes good governance in three basic ways: (1) by inceasing transparency, information, and accountability; (2) by facilitating accurate decision making and public participation, and (3) by enhancing the efficient delivery of public goods and services.”*

Dan pendapat dari Setiyadi (2004) bahwa teknologi informasi telah dibangun untuk mendukung upaya *good governance*.

Dalam penelitian ini dimensi *good governance* yang akan dipergunakan oleh peneliti antara lain mengacu pada pendapat dari Loffler dan Tjokroaminoto yang telah disebutkan dalam kerangka teori diatas, yaitu efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi.

##### 1. Efisiensi

Indikator efisiensi yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Saidi dan Yared (2001) yaitu efisiensi diukur melalui penurunan biaya dan waktu pelayanan serta penyingkatan proses pelayanan.

##### 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan stándar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan perangkat pendukung indikator antara lain: adanya mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pemantauan kinerja, sistem pengawasan dan mekanisme *reward and punishment* .

### 3. Responsivitas

Responsivitas dalam penelitian ini diukur berdasar indikator yang mengacu pada pendapat Siagian (2000) yang mengindikasikan bahwa responsivitas menyangkut kemampuan aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, dan pendapat dari Dwiyanto (2002) yang mengembangkan beberapa indikator responsivitas pelayanan publik, yaitu : keluhan pengguna jasa, sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan pengguna jasa, penggunaan keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan layanan publik, berbagai tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan, dan penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

### 4. Transparansi

Transparansi dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang mengacu pada pendapat Yulianto (2005), yaitu sistem dan prosedur pelayanan yang jelas, ketersediaan informasi, keterbukaan keputusan dan kemudahan masyarakat untuk dapat menilai apakah pelaksanaan aturan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan kejelasan hak dan kewajiban para pengguna jasa.

### 5. Partisipasi

Partisipasi diukur menurut indikator sebagai berikut: Manipulasi, Terapi, pemberian informasi, konsultasi, Penentraman, Kemitraan, kuasa yang didelegasi dan kendali warga .

Jika digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.3  
Operasionalisasi Konsep

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
Evaluasi Penerapan SePP Menurut Perspektif <i>Good Governance</i>	Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penurunan biaya operasional</li> <li>• pemberian layanan tepat waktu</li> <li>• penyingkatan proses pelayanan</li> </ul>
	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adanya kesesuaian antara program dan kebijakan</li> <li>• adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>• dokumentasi proses kegiatan</li> <li>• adanya mekanisme pertanggungjawaban</li> </ul>
	Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kemampuan aparatur dalam mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru</li> <li>• kemampuan/sikap aparat dalam menghadapi keluhan pengguna jasa</li> <li>• kecepatan menangani keluhan</li> <li>• penggunaan keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan layanan publik</li> <li>• tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan</li> </ul>
	Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kejelasan sistem dan prosedur pelayanan (persyaratan, tarif, biaya)</li> <li>• ketersediaan informasi</li> <li>• keterbukaan keputusan</li> <li>• kemudahan masyarakat untuk dapat menilai apakah pelaksanaan aturan telah sesuai dengan ketentuan</li> <li>• kejelasan hak dan kewajiban para pengguna jasa.</li> </ul>
	Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manipulasi</li> <li>• Terapi</li> <li>• pemberian informasi</li> <li>• konsultasi</li> <li>• Penentraman</li> <li>• Kemitraan</li> <li>• kuasa yang didelegasi</li> <li>• kendali warga</li> </ul>

Sumber: diolah berdasar pendapat Loffler dan Tjokroaminoto

## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berangkat berlandaskan pada teori, sehingga penelitian ini berangkat dari teori-teori, Sistem informasi, *e-government*, *e-procurement*, dan teori *good governance*

### 3.2. Jenis Penelitian

Berdasar manfaat penelitian ini termasuk jenis penelitian murni. Penelitian murni merupakan penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama dan dilakukan karena kebutuhan peneliti sendiri dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan tujuan penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran yang detail mengenai bagaimana penerapan SePP di lingkungan Depkominfo.

Dilihat dari dimensi waktu, penelitian ini termasuk penelitian *cross-sectional* karena penelitian ini hanya dilakukan pada kurun waktu tertentu, yakni pada bulan April s.d. Juni 2010 dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan diambil dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder.

#### a. data primer

Kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer dari para responden penelitian. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan tentang penerapan SePP pada para pengguna layanan SePP di Depkominfo.

Kuesioner ini dibuat dengan menggunakan format skala Likert dengan kategori jawaban terdiri dari 5 tingkatan.

Untuk analisis kuantitatif, alternatif jawaban diberi skor dari angka 1 sampai dengan 5 yang merupakan data ordinal, sebagai berikut:

5 : Sangat Setuju

4 : Setuju

3 : Netral

2 : Tidak Setuju

1 : Sangat Tidak Setuju

b. data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku, peraturan, *website*, artikel, jurnal dan juga laporan laporan.

Data sekunder diperlukan untuk memahami sejumlah teori yang terkait dengan variabel penelitian yakni evaluasi penerapan SePP menurut perspektif *good governance* di Depkominfo.

### 3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua obyek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.

Populasi dalam penelitian ini dibatasi pada pengguna SePP yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta yang berjumlah 1139 vendor/perusahaan, meskipun total vendor/perusahaan yang terdaftar sebesar 2752 vendor/perusahaan yang tersebar pada 22 (dua puluh dua) Provinsi (data s.d. 16 April 2010).

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.

Untuk menentukan besaran sampel dalam penelitian ini digunakan rumus dari Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = besaran sampel

N = besaran populasi

E = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel)

Berdasar populasi yang ada, dengan toleransi kesalahan sebesar 10 % (pada penelitian sosial biasanya antara 5 s.d. 10 %) jumlah sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1139}{1 + 1139 * 0,1^2}$$

$$n = 91,9 \approx 92 \text{ orang}$$

sehingga berdasar rumus Slovin jumlah sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 92 vendor/perusahaan, namun dalam penelitian ini sampel dibulatkan menjadi 100 vendor/perusahaan.

Selanjutnya untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini digunakan teknik sistematik sampling, yaitu penarikan sampel dengan memilih elemen pada urutan tertentu.

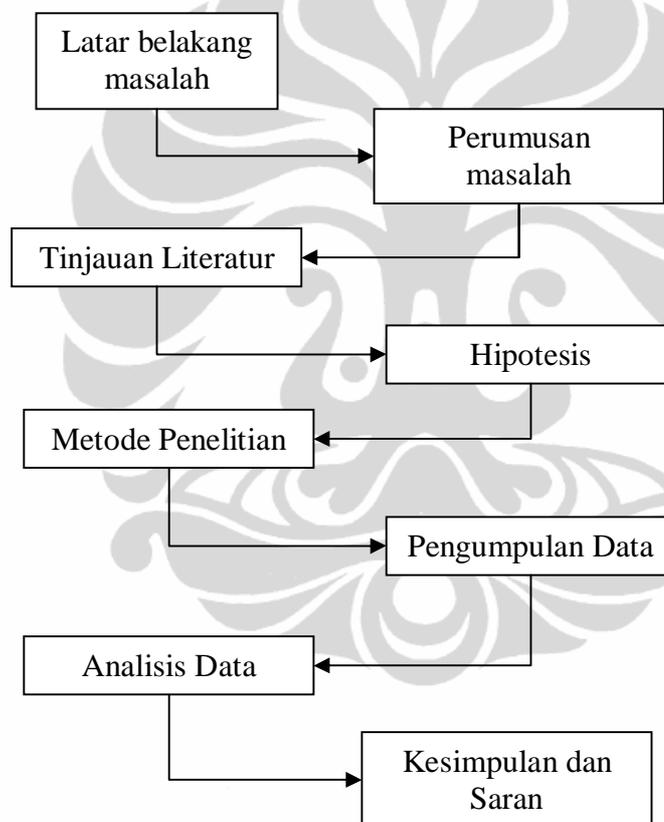
### 3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel, sehingga analisis yang dilakukan merupakan analisis univariat. Berdasarkan pada masalah dan tujuan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik analisis deskriptif, dengan menggunakan tabel silang (*Cross Tabulation*) untuk melihat suatu subyek berdasarkan dua atau lebih karakteristik, dalam hal ini untuk melihat evaluasi penerapan SePP berdasar perspektif *good governance* dari sisi efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi.

Dalam menilai evaluasi penerapan SePP dibagi ke dalam 5 kelas sesuai kategori jawaban, yaitu sebagai berikut:

- 1 - 36 : Sangat buruk
- 37 - 72 : Buruk
- 73 - 108 : Netral
- 109 - 144 : Baik
- 145 - 180 : Sangat Baik

Adapun gambaran proses penelitian adalah sebagai berikut:



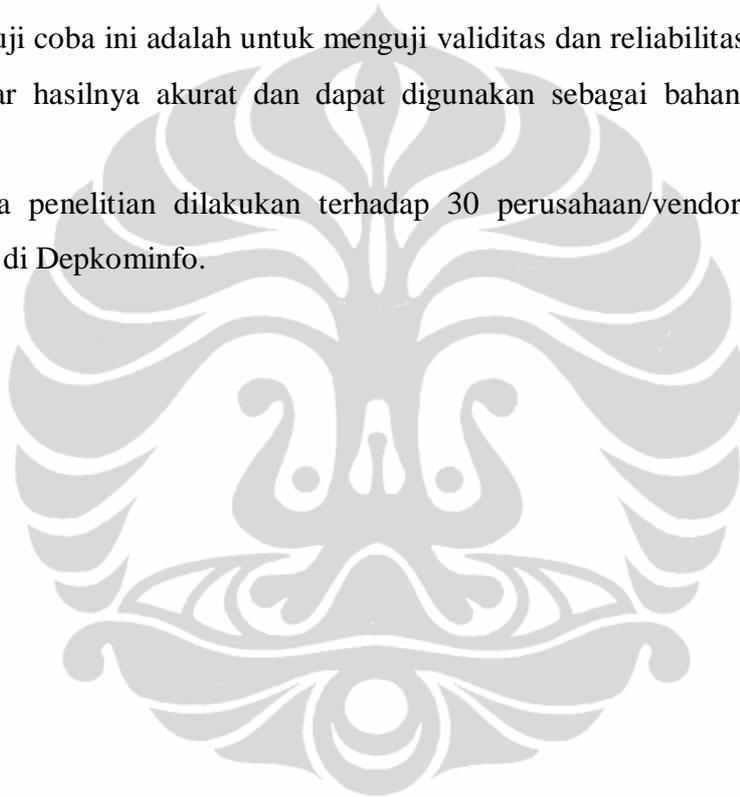
Gambar. 2.5  
Proses penelitian

### 3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum dilakukan analisis data dilakukan uji coba alat instrumen penelitian. Uji coba alat instrumen penelitian dimaksudkan untuk menguji validitas dan reliabilitas variabel penelitian. Validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan alat ukur atau sampai sejauh mana alat ukur mempunyai keakuratan dalam memberikan hasil sesuai dengan yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pengukuran dapat dipercaya.

Tujuan uji coba ini adalah untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian agar hasilnya akurat dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

Uji coba penelitian dilakukan terhadap 30 perusahaan/vendor pengguna layanan SePP di Depkominfo.



## BAB 4

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Depkominfo

Departemen Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Depkominfo mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas, Depkominfo menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

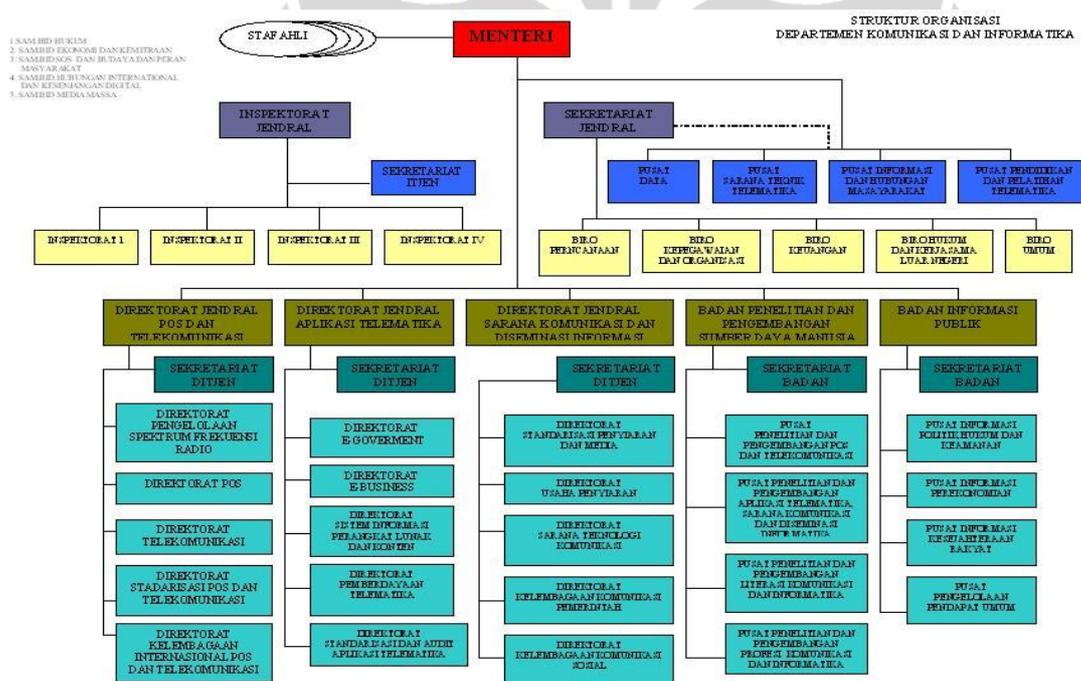
Struktur Organisasi Depkominfo berdasar Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25/P/M. KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkominfo terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal pos dan Telekomunikasi;
- c. Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika;
- d. Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- e. Inspektorat Jenderal;
- f. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Informasi Publik;
- h. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum;
- i. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kemitraan;
- j. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
- k. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional dan Kesenjangan Digital;

- l. Staf Ahli Menteri Bidang Media Massa;
- m. Pusat Data;
- n. Pusat Sarana Teknik Telematika;
- o. Pusat Sarana Informasi dan Hubungan Masyarakat;
- p. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar. 4. 6  
Struktur organisasi Depkominfo



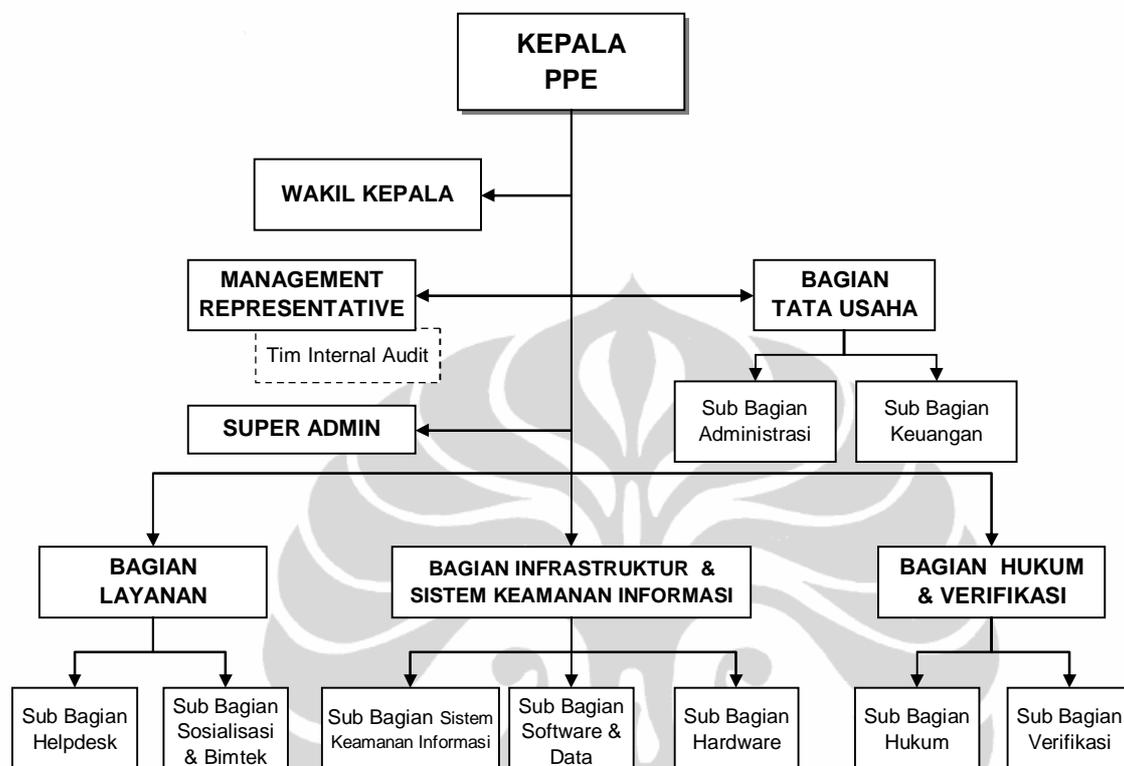
#### 4.2. Gambaran Umum Pusat Pengadaan secara Elektronik (PPE)

Pusat Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut PPE, merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala PPE yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur *e-Business* pada Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika. Pusat Pengadaan Elektronik (PPE) pada awalnya berada di bawah Direktorat *E-Government*, namun dengan adanya kebijakan pimpinan di Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, saat ini PPE berada di lingkungan Direktorat *e-Business*, namun tetap berada di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika.

Pusat Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas membantu Direktur *e-Business* dalam penyelenggaraan sebagian tugas Direktorat *e-Business* di bidang pengadaan secara elektronik. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang pengadaan secara elektronik;
- b. pengelolaan operasional/organisasi;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- d. penyampaian hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Direktur *e-Government*.

Adapun Struktur Pusat Pengadaan Elektronik adalah sebagai berikut:



Gambar 4.7.  
Struktur organisasi PPE

Pusat Pengadaan Secara Elektronik terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Wakil Kepala
- c. Managemen Representative ;
- d. Super Administrator ;
- e. Bagian Tata usaha ;
- f. Bagian Layanan ;
- g. Bagian Infrastruktur dan Sistem Keamanan Informasi ;
- h. Bagian Hukum dan Verifikasi.

#### 4.3. Visi, Misi dan Kebijakan Mutu Pusat Pengadaan Secara Elektronik

Visi Pusat Pengadaan Secara Elektronik adalah terselenggaranya pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip dasar dan kebijakan umum pengadaan pemerintah secara elektronik.

Sedangkan Misi dari Pusat Pengadaan Secara Elektronik adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.
- b. Meningkatkan daya jangkau layanan pengadaan untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka mengurangi kesenjangan digital melalui SePP.
- c. Mendorong peningkatan layanan publik dan dunia usaha melalui SePP dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- d. Menciptakan iklim usaha yang kompetitif dalam persaingan yang sehat di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- e. Meningkatkan kualitas proses dan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah menuju terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).
- f. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan barang/jasa pemerintah di bidang teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme.
- g. Meningkatkan peran aktif publik dalam percepatan pemberantasan korupsi dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa dan negara.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, Pimpinan Manajemen Pusat Pengadaan Secara Elektronik Direktorat E-Government Departemen Komunikasi dan Informatika telah menetapkan suatu Kebijakan Mutu yang diketahui dan dimengerti oleh seluruh Pusat Pengadaan Secara Elektronik Direktorat E-Government Departemen Komunikasi dan Informatika. Kebijakan Mutu tersebut adalah : ” *Your Reliable Partner in Good Governance Procurement*”

Kebijakan Mutu diatas mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Memberikan layanan bermutu yang tepat waktu, mudah, aman dan nyaman sesuai persyaratan dan peraturan perundangan untuk memenuhi kepuasan pengguna.
- Menjalankan sistem manajemen mutu dengan komitmen tinggi di setiap lini organisasi.
- Memberikan solusi yang sistematis untuk menegakkan prinsip good governance serta menciptakan budaya persaingan sehat sesuai dengan etika bisnis.

#### 4.4. Sekilas Sistem Aplikasi SePP

Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) dengan alamat akses [www.sepp.depkominfo.go.id](http://www.sepp.depkominfo.go.id) diawal pengembangannya bernama National e-Procurement Government of Indonesia (NePGI) yang dibangun dan dikembangkan dengan dana pinjaman dari Bank Dunia. Sampai dengan saat ini SePP merupakan versi ke 3 dengan berbagai macam pengembangan serta penyempurnaan aplikasi dan peningkatan infrastruktur dan jaringan komunikasi data guna mencapai kehandalan sistem (*high availability*). Sampai saat ini 5 instansi pemerintah secara aktif telah menggunakan SePP dalam proses pengadaan barang/jasa.

Berikut tampilan halaman awal aplikasi SePP:

Gambar. 4.8.

Halaman Awal Aplikasi SePP

The screenshot shows the homepage of the Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP). The header includes the logo and the text 'Sistem e-Pengadaan Pemerintah' and 'Your Reliable Partner in Good Governance Procurement'. Below the header, there are navigation links: 'Indonesia | English', 'Halaman Awal', 'Modul', 'Tentang SePP', 'Kontak', and 'Masuk'. The main content area is titled 'Selamat Datang di SePP' and contains a welcome message, contact information, and a list of modules. The right sidebar displays the date and time (Rabu, 14 Januari 2009, 2:54:03 PM) and a list of regional portals.

Aplikasi SePP merupakan aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Kominfo berbasis *web* dengan menggunakan bahasa pemrograman JSP dengan menggunakan database Oracle 10g. Server aplikasi menggunakan *Operating System* berbasis *open source* dengan menggunakan Redhat Linux. Untuk melayani penggunaannya SePP menggunakan akses jaringan *dedicated line* sebesar 2Mb, dan juga bekerja sama dengan Badan Otorita Batam untuk menempatkan server DRC (*Data Recovery Center*), yang akan memungkinkan aplikasi SePP diakses apabila *data center* di Jakarta mengalami gangguan/kendala.

Aplikasi SePP dikelola oleh Pusat Pengadaan secara Elektronik (PPE) Departemen Komunikasi dan Informatika, dengan lokasi di Departemen Komunikasi dan Informatika Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta. Dalam rangka pengelolaan SePP, PPE memiliki rincian tugas antara lain :

- a. mengelola sistem e-Procurement
- b. menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia Pengadaan serta penyedia barang/jasa
- c. menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia barang/jasa
- d. menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan sistem *e-Procurement* kepada PPK /Panitia Pengadaan atau Penyedia Barang/jasa
- e. melakukan verifikasi dan aktivasi terhadap data pendaftaran penyedia barang/jasa

Saat ini dalam melayani pengguna terutama penyedia barang/jasa telah dibentuk pula *helpdesk* yang berlokasi di Badan Otorita Batam selain yang sudah ada di Jakarta, dan dalam waktu dekat akan dibentuk *helpdesk* daerah sehingga penyedia barang/jasa di daerah tersebut dapat secara cepat dilayani.

Secara sistem 8 instansi yaitu pusat, daerah serta BUMN telah terdaftar sebagai pengguna aplikasi SePP, yaitu :

- a. Kementerian Kominfo
- b. Kementerian Perhubungan
- c. Kementerian Pertanian
- d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

- e. Badan Otorita Batam
- f. Pemerintah Provinsi NTB
- g. Perum Peruri
- h. PT. Taspen (Persero)

Namun dalam penerapannya hanya 6 instansi yang telah aktif menggunakan aplikasi, sedangkan 2 instansi lainnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Perum Peruri dikarenakan alasan kebijakan manajemen sehingga sampai saat ini belum menggunakan aplikasi SePP dalam proses pengadaan barang/jasa. Khusus KPK saat ini telah menggunakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh LKPP yaitu aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

#### **4.5. Modul-Modul Aplikasi SePP**

Aplikasi SePP memiliki 3 modul utama dan 4 modul pendukung masing-masing modul dilengkapi dengan fitur-fitur pendukung sehingga aplikasi dapat digunakan dengan baik. Seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.9.  
Modul Utama SePP



#### Keterangan

1. Modul e-Lelang yaitu digunakan pelelangan umum untuk pengadaan barang/pemborongan dan jasa lainnya, dengan metode pengadaan Pascakualifikasi dan prakualifikasi, metode evaluasi sistem gugur, merit point dan nilai ekonomis
2. Modul e-Seleksi yaitu digunakan pada proses seleksi umum untuk pengadaan jasa konsultansi, metode pengadaan prakualifikasi, metode evaluasi kualitas dan biaya, kualitas, pagu anggaran
3. Modul e-Pembelian terdiri dari
  - pembelian langsung yaitu pembelian barang secara elektronik dengan menggunakan katalog barang/jasa Penyedia Barang/Jasa;

- Modul e-Reverse Auction yaitu lelang berulang terbalik, metode pelelangan yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa di mana penyedia barang/jasa dapat memberikan penawaran harga dalam kurun waktu tertentu, untuk mendapatkan penawaran terendah.

Modul pendukung SePP dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 4.10  
Modul Pendukung SePP



Keterangan:

1. Sistem Manajemen Instansi Pemerintah yaitu pengelolaan data profil serta pembuatan user ID dan password instansi pemerintah
2. Sistem Manajemen Penyedia Barang/jasa yaitu profil perusahaan
3. e-Katalog yaitu merupakan *show window* atau etalase penyedia barang/jasa di dunia maya.

#### 4. Fitur Pendukung

- *Audit trail* atau *user log* yang akan mencatat aktivitas seluruh *user*.
- Verifikasi serta aktivasi ID penyedia barang/jasa.
- Blacklist perusahaan

Pengguna (*User*) yang terlibat dalam sistem ini adalah:

##### 1. Super Administrator

Berfungsi untuk melakukan aktivasi user ID penyedia barang/jasa, serta melakukan updating data yang terkait dengan proses pengadaan

##### 2. Administrator Instansi

Berfungsi untuk membuat, mengupdate serta memelihara user Id pada instansi bersangkutan.

##### 3. Verifikator

Berfungsi untuk melakukan verifikasi kesesuaian data penyedia barang/jasa yang telah mendaftar pada SePP

##### 4. Pejabat Pembuat Komitmen

Memiliki tugas membuat Program kegiatan, Mata Anggaran Kegiatan serta menyetujui proses yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan

##### 5. Panitia Pengadaan Barang/jasa

Memiliki tugas menjalankan seluruh proses pengadaan secara elektronik

##### 6. Penyedia Barang/Jasa

Mengikuti proses kegiatan pengadaan sesuai dengan klasifikasi perusahaan serta bidang usaha

Dari 6 (enam) user yang telah disebutkan di atas, hanya 3 (tiga) user yang terlibat langsung dalam proses pengadaan yaitu : Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta Penyedia Barang/Jasa.

Informasi yang dapat diperoleh dari sistem ini adalah berupa :

- Informasi data pengadaan yang terdiri dari : nilai perkiraan pekerjaan, uraian singkat pekerjaan, item pekerjaan, kebutuhan tenaga ahli
- Jadwal pengadaan
- Peserta pengadaan
- Pengumuman Calon Pemenang dan Pemenang
- Serta dokumen pengadaan yang dapat didownload

#### 4.6. Kesesuaian penerapan SePP dengan Keppres No. 80 tahun 2003

Perbandingan kesesuaian proses bisnis pada aplikasi SePP dengan Keppres No. 80/2003, dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 4.4.  
Kesesuaian Keppres 80/2003 dengan Aplikasi SePP

KEPPRES NO. 80/2003	APLIKASI SePP
<b>a. Pengumuman dan Pendaftaran</b>	
Lampiran I Bab II 1) Panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum dengan pascakualifikasi atau adanya prakualifikasi dalam rangka pelelangan umum untuk pengadaan yang kompleks, melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik	√  Setiap paket pengadaan yang dilakukan dengan menggunakan SePP akan diumumkan secara luas melalui media internet
2) Isi Pengumuman memuat sekurang-kurangnya :  a) Nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan mengadakan pelelangan umum;	√  Pada menu detail ditiap paket terdapat

KEPPRES NO. 80/2003	APLIKASI SePP
b)Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli; c)Perkiraan nilai pekerjaan; d)Syarat-syarat peserta lelang umum e)Tempat, tanggal hari dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan	seluruh informasi tentang pengadaan tersebut antara lain : detail paket, jadwal, data peserta, data dokumen paket
4) Calon peserta lelang dari propinsi/ kabupaten/kota lain tidak boleh dihalangi/dilarang untuk mengikuti proses lelang di provinsi/kabupaten/kota lokasi pelelangan	√  Saat ini telah terdaftar 2800 penyedia barang/jasa yang berasal dari 22 provinsi
<b>d. Penjelasan Lelang (Aanwijzing)</b>	
1) Penjelasan lelang dilakukan ditempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam peserta lelang  5) Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia/pejabat pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam <b><u>Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan minimal 1(satu) wakil dari peserta yang hadir,</u></b> dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa	√  Aanwijzing dilakukan secara manual dikarenakan dalam Keppres No. 80/2003 panitia dan wakil peserta yang hadir wajib menandatangani berita cara, dalam penggunaan sistem aanwijzing secara online melalui media yang telah disediakan.
<b>e. Penyampaian dan Pembukaan Penawaran</b>	
1) Metoda Penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa  4) Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia/pejabat pengadaan membuka	√  Pemasukan penawaran dilakukan secara manual dan online.  Dalam sistem pemasukan waktu pemasukan

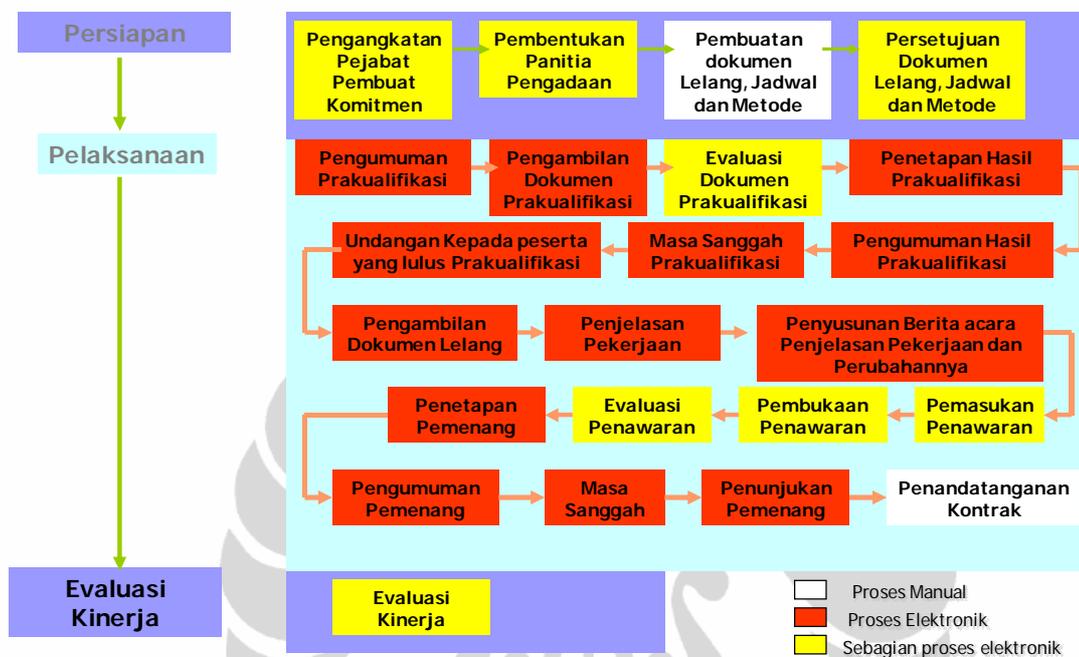
KEPPRES NO. 80/2003	APLIKASI SePP
<p>rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para peserta lelang bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk</p> <p>7) a. Panitia/pejabat pengadaan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta pelelangan yang hadir sebagai saksi...</p> <p>d.Panitia/pejabat pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta pelelangan mengenai kelengkapan dokumen penawaran...</p>	<p>penawaran onlindisesuaikan dengan dokumen lelang</p> <p>Pembukaan penawaran dilakukan secara manual dengan memperhatikan kesesuaian data penawaran secara online</p>

#### 4.7. Alur Proses Aplikasi SePP

Proses bisnis aplikasi SePP merupakan alur pengadaan yang ditetapkan dalam Keppres No. 80 tahun 2003. Secara aplikasi seluruh proses pengadaan dapat dilakukan secara elektronik namun dikarenakan belum adanya aturan baku tentang proses bisnis pengadaan secara e-Procurement, sistem dibangun dengan mengadopsi tahapan pengadaan pada Keppres No. 80 tahun 2003 dengan penambahan proses secara elektronik sepanjang proses elektronik tersebut tidak menyalahi aturan yang telah ada.

Secara garis besar alur proses bisnis pada SePP seperti pada bagan dibawah ini

Gambar 4.11  
Proses Bisnis SePP



Keterangan :

### 1. Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan dilakukan secara manual seperti pembahasan TOR (*Term of Reference*)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pembuatan Dokumen Lelang, menyusun OE (*Owner Estimate*)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta penyusunan draft iklan serta jadwal rencana pengadaan. Setelah itu hasil dari pembahasan tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem.

### 2. Pelaksanaan Pengadaan

Seluruh proses pengadaan mulai dari pengumuman, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran serta evaluasi penawaran, dapat dilakukan secara elektronik. kecuali pada tahapan negosiasi kontrak serta tanda tangan kontrak. (secara detail akan dijelaskan pada bagian lain) .

### 3. Evaluasi Kerja

SePP memiliki fasilitas untuk melakukan input hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa. Hasil ini dapat digunakan oleh panitia atau instansi lain sebagai bahan referensi dalam pemilihan penyedia barang/jasa untuk suatu pekerjaan.

#### 4.8. Alur Proses Bisnis Modul e-Lelang

Modul e-Lelang adalah modul yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang, jasa lainnya serta pemborongan, alur prosesnya adalah sebagai berikut :

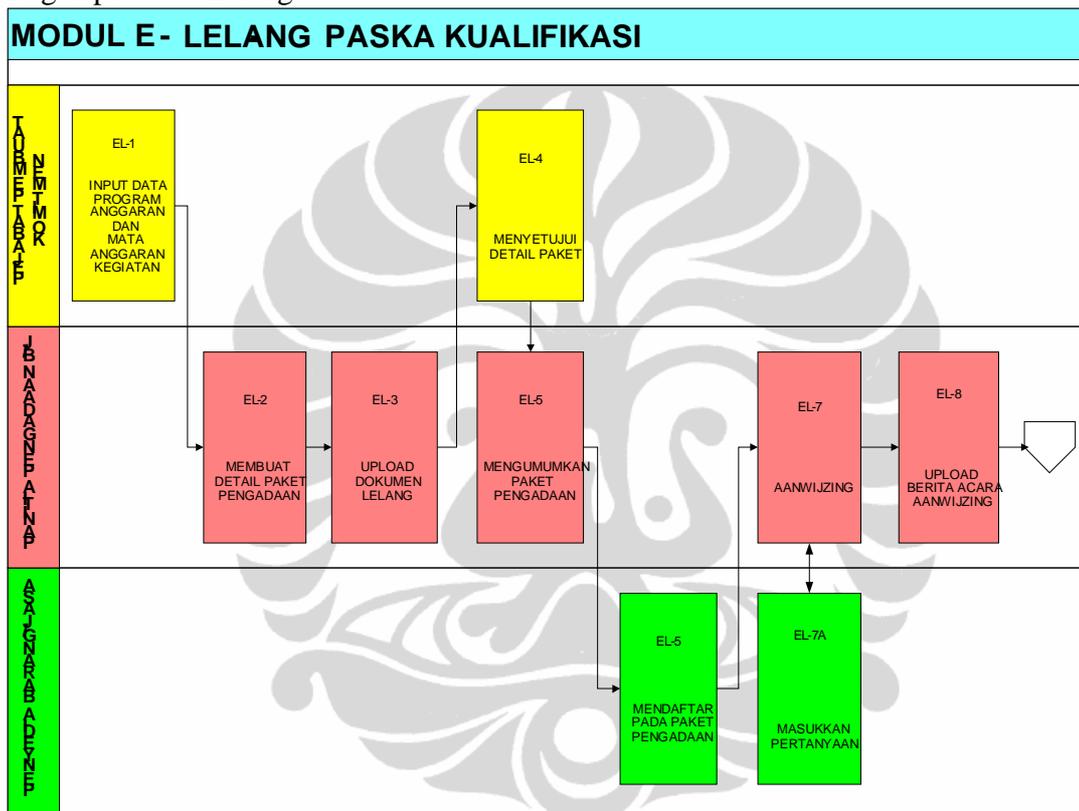
- Input data Program Anggaran dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Input data Mata Anggaran Kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Input data Paket Kegiatan dilakukan oleh panitia pengadaan
- Pembuatan Detail Paket Pengadaan, terdiri dari :
  - Pembuatan jadwal pengadaan
  - Penyiapan dokumen lelang
 dilakukan oleh panitia pengadaan dan sebelum paket diumumkan pejabat pembuat komitmen harus memberikan persetujuan
- Pengumuman dan pendaftaran lelang dil
- Pengambilan dokumen lelang
- Penjelasan pekerjaan (aanwijzing)
- Pemasukan penawaran
- Pembukaan penawaran
- Evaluasi penawaran
- Penetapan dan pengumuman pemenang
- Masa sanggah
- Penunjukan penyedia barang/jasa
- Penandatanganan kontrak

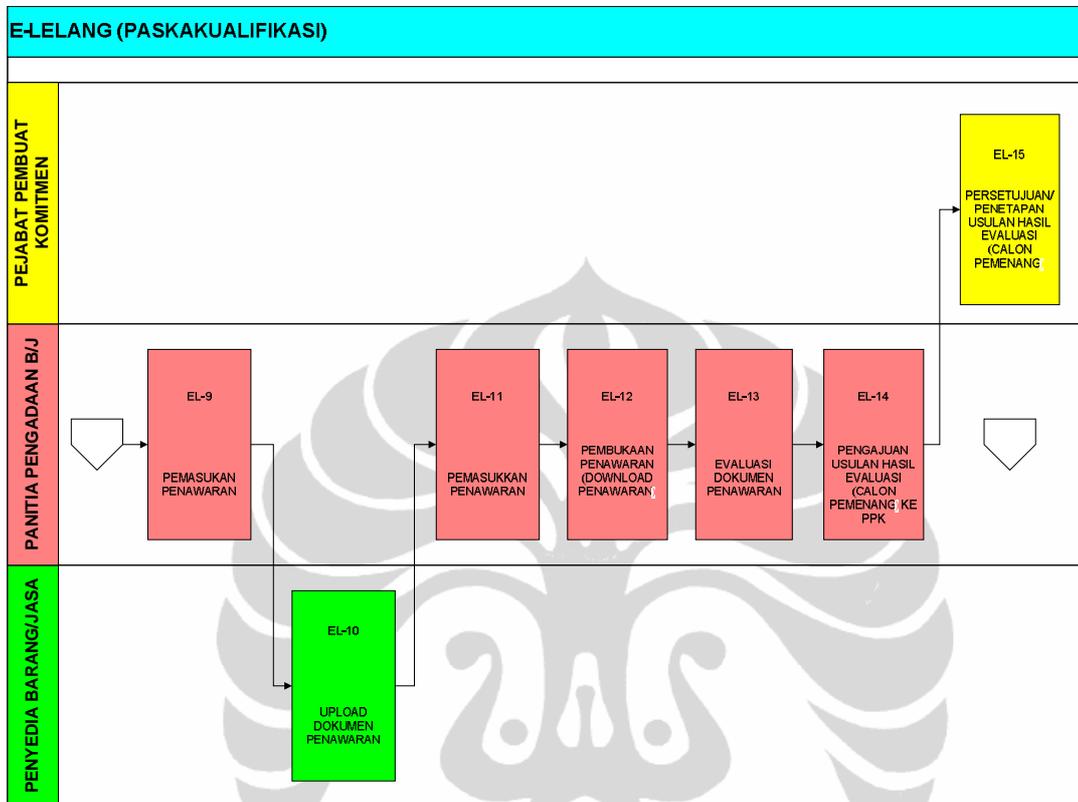
Jika digambarkan sebagai berikut:

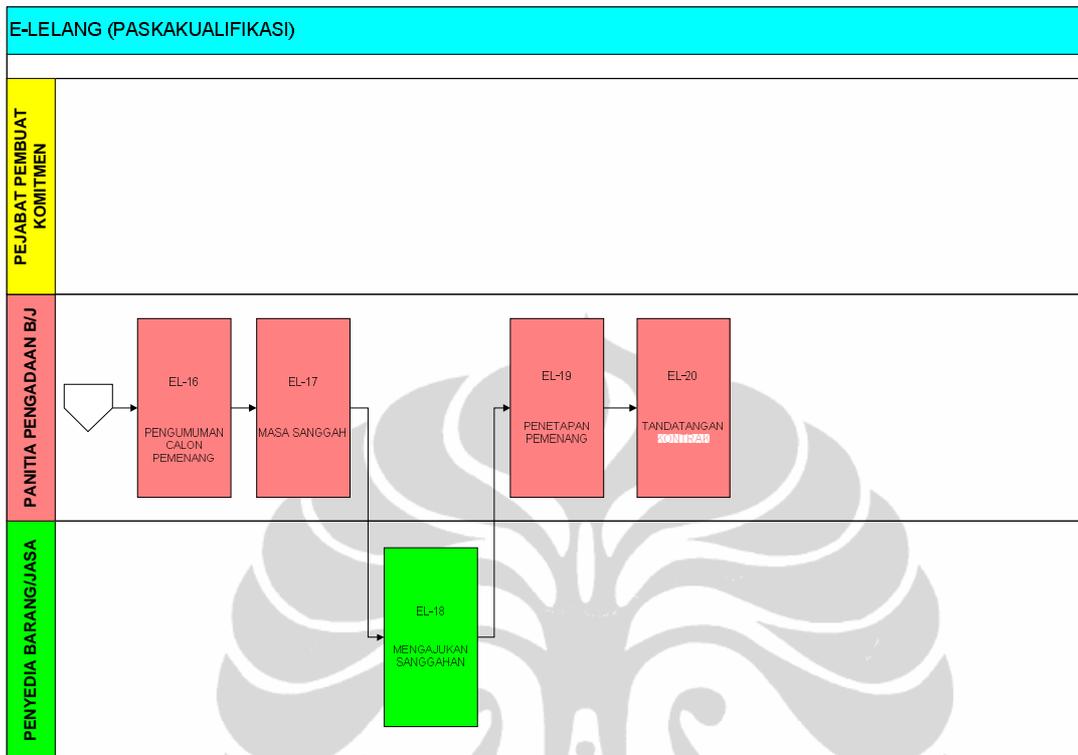
Gambar 4.12.

Bagan Proses e-lelang

Bagan proses e-Lelang







## BAB 5

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Karakteristik Perusahaan

Proses penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Mei 2010 sampai dengan awal Juni 2010 terhadap 100 perusahaan yang diambil sebagai responden dalam penelitian ini yang sudah ditentukan berdasar teknik sistematik sampling.. Berikut adalah data karakteristik perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini.

##### 5.1.1. Karakteristik Perusahaan Berdasar Jenis Pengadaan

Karakteristik perusahaan berdasar jenis pengadaan adalah 29 perusahaan (29%) termasuk dalam kategori pengadaan barang, 14 perusahaan termasuk kategori pengadaan jasa lainnya (14%), 7 perusahaan termasuk dalam kategori pemborongan (7%), 7 perusahaan termasuk dalam kategori jasa konsultasi konstruksi (7%), 18 perusahaan termasuk dalam kategori jasa konsultasi non konstruksi (18%), dan 25 perusahaan merupakan perusahaan dengan kategori pengadaan barang dan jasa (25%). Berikut ini adalah karakteristik perusahaan berdasar jenis pengadaan yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.5

Karakteristik Perusahaan Berdasar Jenis Pengadaan

No	Jenis Pengadaan	Jumlah	Persentase
1.	Barang	29	29 %
2.	Jasa Lainnya	14	14 %
3.	Pemborongan	7	7 %
4.	jasa konsultasi konstruksi	7	7 %

No	Jenis Pengadaan	Jumlah	Persentase
5.	jasa konsultasi non konstruksi	18	18 %
6.	barang dan jasa	25	25 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perusahaan dengan jenis pengadaan barang serta perusahaan dengan jenis pengadaan barang dan jasa mempunyai persentase yang lebih tinggi dari perusahaan dengan jenis pengadaan yang lain. Hal ini dikarenakan jenis pengadaan barang merupakan pengadaan yang paling banyak dilakukan oleh instansi pemerintah karena termasuk dalam pengadaan yang sifatnya rutin.

### 5.1.2. Karakteristik Perusahaan Berdasar Modal

Karakteristik perusahaan berdasar jenis modal dibagi menjadi tiga yaitu modal nasional, PMA dan lain-lain yang bisa merupakan modal campuran ataupun modal pribadi.

Tabel 5.6

#### Karakteristik Perusahaan Berdasar Jenis Modal

No	Jenis Modal	Jumlah	Persentase
1.	Nasional	75	75 %
2.	PMA	10	10 %
3.	Lain-lain	15	15 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Berdasarkan data di atas, perusahaan dengan modal nasional sebanyak 75 perusahaan (75%), perusahaan dengan modal asing sebanyak 10 perusahaan (10%) dan perusahaan dengan modal selain modal nasional dan PMA sebesar 15 perusahaan (15%). Hal ini dikarenakan perusahaan dengan modal nasional merupakan perusahaan yang dominan sebagai penyedia barang dan jasa yang terdaftar dalam SePP.

### 5.1.3. Karakteristik Perusahaan Berdasar Jumlah Modal

Karakteristik perusahaan berdasar jumlah modal dibedakan dalam dua jenis modal yaitu modal yang berupa uang dan modal sumber daya manusia/karyawan.

Berdasar modal yang berupa uang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.7

Karakteristik Perusahaan Berdasar Skala Modal Yang Berupa Uang

No	Jumlah Modal	Jumlah	Persentase
1.	≤ 50 juta	0	0 %
2.	51 juta – 500 juta	58	58 %
3.	501 juta – 1 Milyar	22	22 %
4.	> 1 Milyar	20	20 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Berdasar peraturan pengadaan barang dan jasa dalam Keppres 80 Tahun 2003, jumlah modal perusahaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu modal kecil dan non kecil. Perusahaan dengan skala kecil adalah perusahaan dengan modal ≤ 50 juta rupiah, sedangkan perusahaan dengan modal di atas 50 juta rupiah merupakan perusahaan dengan modal non kecil.

Berdasar tabel diatas, dapat dikatakan bahwa seluruh perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan perusahaan dengan kategori non kecil (modal di atas 50 juta rupiah).

Sedangkan jika dilihat dari jumlah karyawan, perusahaan dengan jumlah karyawan < 10 orang sebanyak 24 perusahaan (24%), perusahaan dengan jumlah karyawan antara 10 – 20 orang sebanyak 55 perusahaan (55%), perusahaan dengan jumlah karyawan antara 21 – 30 orang sebanyak 6 perusahaan (6%) dan perusahaan dengan jumlah karyawan > 41 orang sebanyak 2 perusahaan (2%). Data keseluruhan skala perusahaan dilihat dari jumlah karyawan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8

## Karakteristik Perusahaan Berdasar Skala Modal Jumlah Karyawan

No	Jumlah karyawan	Jumlah	Persentase
1.	< 10 orang	24	24 %
2.	10 – 20 orang	55	55 %
3.	21 – 30 orang	13	13 %
4.	31 – 40 orang	6	6 %
5.	> 41 orang	2	2 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Berdasar data dalam tabel di atas, perusahaan dengan jumlah karyawan antara 10 – 20 orang merupakan responden yang terbesar dalam penelitian ini (55%). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sudah menerapkan sistem elektronik tidak memerlukan sumber daya manusia yang terlalu besar sehingga dapat lebih menghemat biaya operasional perusahaan.

#### 5.1.4. Karakteristik Perusahaan Berdasar Bentuk Badan Hukum

Perusahaan dengan bentuk badan hukum perorangan sebanyak 5 perusahaan (5%), perusahaan berbentuk PT (Tbk) sebanyak 15 perusahaan (15%), perusahaan berbentuk CV sebanyak 22 perusahaan (22%) dan perusahaan dengan bentuk badan hukum PT (Non Tbk) sebanyak 58 perusahaan (58%). Karakteristik perusahaan berdasar bentuk badan hukum dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.9

Karakteristik Perusahaan Berdasar Bentuk Badan Hukum

No	Bentuk Badan Hukum	Jumlah	Persentase
1.	Perorangan	5	5 %
2.	PT (Tbk)	15	15 %
3.	CV	22	22 %
4.	PT (Non Tbk)	58	58 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Berdasar data dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa perusahaan dengan bentuk badan hukum PT (Non Tbk) merupakan responden terbesar dalam penelitian ini yaitu sebesar 58%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan merupakan perusahaan nasional, dimana salah satu syarat pendirian PT adalah minimal dua orang WNI, dan berdasar UU 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas syarat untuk mendirikan PT adalah dengan modal di atas 50 juta rupiah.

## 5.2. Karakteristik Responden

Berikut adalah Karakteristik responden yang telah mengisi kuesioner dalam penelitian ini.

### 5.2.1. Karakteristik Responden Berdasar Jenis Kelamin

Jumlah responden dengan jenis kelamin pria sebanyak 77 orang (77%) dan responden dengan jenis kelamin wanita sebanyak 23 orang (23%). Berdasarkan data mayoritas responden berjenis kelamin pria, yaitu sebesar 77 %.

Berikut karakteristik responden berdasar jenis kelamin.

Tabel 5.10  
Karakteristik Responden Berdasar Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Pria	77	77 %
2.	Wanita	23	23 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Meskipun responden mayoritas berjenis kelamin pria, hal ini bukan merupakan masalah dalam proses pengadaan secara elektronik, karena yang diperlukan adalah kemampuan menggunakan internet dan pengetahuan mengenai pengadaan barang dan jasa.

### 5.2.2. Karakteristik Responden Berdasar Usia

Jumlah responden yang mempunyai umur 30 tahun ke bawah sebanyak 9 responden (9%), umur 31 – 40 tahun sebanyak 56 responden (56%), umur 41 – 50 tahun sebanyak 30 responden dan responden yang berumur di atas 50 tahun

sebanyak 5 responden (5%). Dalam penelitian ini semua golongan usia terwakili dan tersebar sesuai persentase yang dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.11  
Karakteristik Responden Berdasar Usia

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	≤ 30 tahun	9	9 %
2.	31 – 40 tahun	56	56 %
3.	41 – 50 tahun	30	30 %
4.	> 50 Tahun	5	5 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Berdasar tabel di atas, mayoritas responden mempunyai umur antara 31 – 40 tahun, yaitu sebanyak 56 %. Hal itu menandakan bahwa mayoritas responden adalah termasuk dalam kategori usia produktif.

### 5.2.3. Karakteristik Responden Berdasar Tingkat Pendidikan

Responden yang mempunyai tingkat pendidikan SLTA ke bawah sebanyak 4 orang (4%), DIII sebanyak 18 orang (18%), S1 sebanyak 74 orang (74%) dan responden yang berpendidikan S2 sebanyak 4 orang (4%). Berikut adalah karakteristik responden berdasar tingkat pendidikan.

Tabel 5.12

## Karakteristik Responden Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SLTA ke bawah	4	49 %
2.	DIII	18	18 %
3.	S1	74	74 %
4.	S2	4	4 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Berdasar tingkat pendidikan mayoritas responden mempunyai tingkat pendidikan sarjana strata satu, yaitu sebanyak 74 responden (74%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai pendidikan yang cukup tinggi sehingga mempunyai kemampuan dalam mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

#### 5.2.4. Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi Penggunaan Internet

Karakteristik responden berdasar frekuensi penggunaan internet menunjukkan bahwa 20 responden (20%) menggunakan internet minimal 4x dalam sebulan, 75 responden (75%) menggunakan internet setiap hari, dan 5 responden (5%) menggunakan internet apabila perlu saja. Berikut adalah Karakteristik responden berdasar frekuensi penggunaan internet:

Tabel 5.13

## Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi Penggunaan Internet

No	Frekuensidikan	Jumlah	Persentase
1.	min 4x sebulan	20	20 %
2.	setiap hari	75	75 %
3.	bila perlu	5	5 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Berdasar data di atas, mayoritas responden setiap hari menggunakan internet, yaitu sebanyak 75 responden (75%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah familiar dengan penggunaan internet sehingga mudah mengikuti prosedur yang ada dalam SePP.

### 5.2.5. Karakteristik Responden Berdasar Awal Penggunaan Internet

Responden yang telah menggunakan internet dalam kurun waktu antara 6 - < 1 tahun sebanyak 3 responden (3%), 1 - < 2 tahun sebanyak 6 responden (6%), 2 - <3 tahun sebanyak 1 responden dan > 3 tahun sebanyak 90 responden (90%). Berikut adalah karakteristik awal penggunaan internet selengkapnya.

Tabel 5.14

## Karakteristik Responden Berdasar Mulai Menggunakan Internet

No	Mulai Menggunakan Internet	Jumlah	Persentase
1.	6 - < 1 thn	3	3 %
2.	1 - < 2 thn	6	6 %
3.	2 - < 3 thn	1	1 %

No	Mulai Menggunakan Internet	Jumlah	Persentase
4.	> 3 thn	90	90 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden telah menggunakan internet lebih dari 3 tahun, yaitu sebanyak 90 responden (90%).

Hal ini menunjukkan bahwa internet merupakan sesuatu yang sudah biasa bagi responden sehingga responden tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan program SePP.

#### 5.2.6. Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi Mengakses SePP

Responden dengan frekuensi mengakses SePP setiap hari sebanyak 9 responden (9%), 1x seminggu sebanyak 21 responden (21%), 2 minggu sekali sebanyak 8 responden (8%), 1 bulan sekali sebanyak 32 responden (32%) dan bila perlu sebanyak 30 responden (30%). Berikut adalah karakteristik responden berdasar frekuensi mengakses SePP.

Tabel 5.15

Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi Mengakses SePP

No	Mulai Menggunakan Internet	Jumlah	Persentase
1.	setiap hari	9	9 %
2.	1x seminggu	21	21 %
3.	2 minggu sekali	8	8 %
4.	1 bln sekali	32	32 %
5.	bila perlu	30	30 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Dari data di atas dapat dilihat bahwa, mayoritas responden mengakses SePP dengan frekuensi satu bulan sekali yaitu sebanyak 32 responden (32%) . Hal ini karena setiap kali ada proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui SePP sebelumnya selalu diumumkan di koran nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga responden dapat mengetahui kapan ada pengumuman pengadaan barang dan jasa.

### **5.3. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Uji coba penelitian dilakukan terhadap 30 perusahaan/penyedia barang dan jasa yang terdaftar sebagai pengguna layanan SePP di Depkominfo. Pengujian Validitas dan Reliabilitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik SPSS 13,0 for Windows (*correlate-bivariate*).

#### **5.3.1. Uji Validitas**

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas internal dengan cara analisis faktor, yaitu pengujian validitas dengan mengkorelasikan skor-skor yang ada dalam satu faktor, kemudian mengkorelasikan skor faktor dengan skor total.

##### **a. Uji Validitas Pada Dimensi Efisiensi**

Dimensi efisiensi terdiri dari tiga indikator yang dijabarkan ke dalam tujuh pertanyaan. Hasil uji validitas terhadap dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16  
Uji Validitas Dimensi Efisiensi

		Correlations							
		pendaftaran tidak dipungut biaya	hemat biaya operasional	tepat waktu	hemat waktu	mudah	pendaftaran lebih cepat	proses lebih singkat	efisiensi
Spearman's pendaftaran tidak dipungut biaya	Correlation Coe	1.000	.168	.413*	.286*	.079	.242*	.230*	.415*
	Sig. (2-tailed)	.	.094	.000	.004	.433	.015	.022	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
hemat biaya ope	Correlation Coe	.168	1.000	.376*	.488*	.502*	.487*	.535*	.704*
	Sig. (2-tailed)	.094	.	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
tepat waktu	Correlation Coe	.413*	.376*	1.000	.813*	.446*	.595*	.514*	.814*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
hemat waktu	Correlation Coe	.286*	.488*	.813*	1.000	.514*	.753*	.636*	.874*
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
mudah	Correlation Coe	.079	.502*	.446*	.514*	1.000	.377*	.607*	.711*
	Sig. (2-tailed)	.433	.000	.000	.000	.	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
pendaftaran lebih	Correlation Coe	.242*	.487*	.595*	.753*	.377*	1.000	.654*	.779*
	Sig. (2-tailed)	.015	.000	.000	.000	.000	.	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
proses lebih sing	Correlation Coe	.230*	.535*	.514*	.636*	.607*	.654*	1.000	.791*
	Sig. (2-tailed)	.022	.000	.000	.000	.000	.000	.	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
efisiensi	Correlation Coe	.415*	.704*	.814*	.874*	.711*	.779*	.791*	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\*Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas terhadap pertanyaan dalam dimensi efisiensi menghasilkan koefisien korelasi yang signifikan secara statistik. Semua butir pertanyaan berkorelasi positif dengan skor dimensi efisiensi. Maka kesimpulan yang bias diambil adalah bahwa ketujuh pertanyaan yang digunakan dalam dimensi efisiensi adalah valid.

#### b. Uji Validitas Pada Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas terdiri dari empat indikator yang dijabarkan ke dalam enam pertanyaan. Hasil uji validitas terhadap dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17  
Uji Validitas Dimensi Akuntabilitas

			Correlations						
			program sesuai kebijakan	selalu disesuaikan dengan kebijakan baru	kesalahan diminimalkan	proses terdokumen dipertanggung jawabkan	hasil dapat dipertanggung jawabkan	perbaikan kesalahan	akuntabilitas
Spearman's program sesuai kebijakan	Correlation Coef		1.000	.681*	.429*	.662*	.374*	.402*	.635**
	Sig. (2-tailed)		.	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N		100	100	100	100	100	100	100
selalu disesuaikan dengan kebijakan t	Correlation Coef		.681*	1.000	.537*	.668*	.508*	.545*	.785**
	Sig. (2-tailed)		.000	.	.000	.000	.000	.000	.000
	N		100	100	100	100	100	100	100
kesalahan dimini	Correlation Coef		.429*	.537*	1.000	.753*	.883*	.707*	.860**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.	.000	.000	.000	.000
	N		100	100	100	100	100	100	100
proses terdokumen	Correlation Coef		.662*	.668*	.753*	1.000	.748**	.638*	.836**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.	.000	.000	.000
	N		100	100	100	100	100	100	100
hasil dapat dipertanggungjawa	Correlation Coef		.374*	.508*	.883*	.748**	1.000	.753*	.857**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.	.000	.000
	N		100	100	100	100	100	100	100
perbaikan kesalaha	Correlation Coef		.402*	.545*	.707*	.638*	.753*	1.000	.864**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.	.000
	N		100	100	100	100	100	100	100
akuntabilitas	Correlation Coef		.635**	.785*	.860**	.836**	.857**	.864**	1.000
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N		100	100	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas terhadap pertanyaan dalam dimensi akuntabilitas menghasilkan koefisien korelasi yang signifikan secara statistik. Semua butir pertanyaan berkorelasi positif dengan skor dimensi akuntabilitas. Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa keenam pertanyaan yang digunakan dalam dimensi akuntabilitas adalah valid.

### c. Uji Validitas Pada Dimensi Responsivitas

Dimensi responsivitas terdiri dari lima indikator yang dijabarkan ke dalam delapan pertanyaan. Hasil uji validitas terhadap dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18  
Uji Validitas Dimensi Responsivitas

**Correlations**

	perbaikan layanan	kemampuan petugas	tempat penyampaian pendapat	tanggungjawab petugaa	anggapan yang baik dari petugaa	referensi perbaikan	elayanan yang sama	berdasar aturan	responsivitas	
Spearman perbaikan layar	Correlation C	1.000	.810*	.589*	.540*	.544*	.585*	.533*	.559*	.796*
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kemampuan pe	Correlation C	.810*	1.000	.574*	.528*	.453*	.538*	.513*	.593*	.767*
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
tempat penyarr	Correlation C	.589*	.574*	1.000	.722*	.620*	.352*	.329*	.556*	.686*
pendapat	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.000	.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
tanggungjawab	Correlation C	.540*	.528*	.722*	1.000	.542*	.352*	.326*	.655*	.695*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.000	.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
tanggapan yan	Correlation C	.544*	.453*	.620*	.542*	1.000	.672*	.817*	.770*	.861*
dari petugaa	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
referensi perba	Correlation C	.585*	.538*	.352*	.352*	.672*	1.000	.745*	.718*	.831*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
elayanan yan	Correlation C	.533*	.513*	.329*	.326*	.817*	.745*	1.000	.601*	.777*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.001	.000	.000	.	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
berdasar atura	Correlation C	.559*	.593*	.556*	.655*	.770*	.718*	.601*	1.000	.860*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
responsivitas	Correlation C	.796*	.767*	.686*	.695*	.861*	.831*	.777*	.860*	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\*Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas terhadap pertanyaan dalam dimensi responsivitas menghasilkan koefisien korelasi yang signifikan secara statistik.

Semua butir pertanyaan berkorelasi positif dengan skor dimensi responsivitas. Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa kedelapan pertanyaan yang digunakan dalam dimensi responsivitas adalah valid.

#### d. Uji Validitas Pada Dimensi Transparansi

Dimensi transparansi terdiri dari lima indikator yang dijabarkan ke dalam enam pertanyaan. Hasil uji validitas terhadap dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.19  
Uji Validitas Dimensi Transparansi

**Correlations**

	istem dan prosedur	informasi program	kesempatan yang sama	penjelasan keputusan	kontrol thd proses	diketahui pengguna jasa	ransparansi	
Spearman's sistem dan procec	Correlation Coef	1.000	.751*	.550*	.565*	.582*	.311*	.765**
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
informasi program	Correlation Coef	.751*	1.000	.815*	.710*	.762*	.255*	.790**
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.000	.011	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
kesempatan yang	Correlation Coef	.550*	.815*	1.000	.656*	.765**	.410*	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
penjelasan keputu	Correlation Coef	.565*	.710*	.656*	1.000	.710*	.263*	.760**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.000	.008	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
kontrol thd proses	Correlation Coef	.582*	.762*	.765*	.710*	1.000	.478*	.889**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
diketahui penggun	Correlation Coef	.311*	.255*	.410*	.263*	.478*	1.000	.675**
	Sig. (2-tailed)	.002	.011	.000	.008	.000	.	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
transparansi	Correlation Coef	.765**	.790**	.792**	.760**	.889**	.675**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\*Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

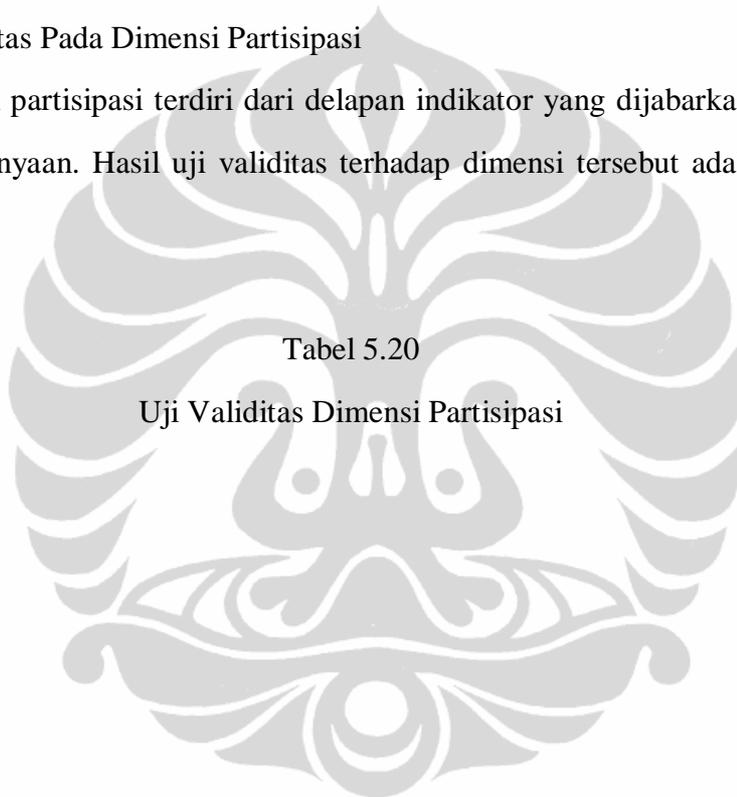
\*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas terhadap pertanyaan dalam dimensi transparansi menghasilkan koefisien korelasi yang signifikan secara statistik. Semua butir pertanyaan berkorelasi positif dengan skor dimensi transparansi. Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa keenam pertanyaan yang digunakan dalam dimensi transparansi adalah valid.

e. Uji Validitas Pada Dimensi Partisipasi

Dimensi partisipasi terdiri dari delapan indikator yang dijabarkan ke dalam delapan pertanyaan. Hasil uji validitas terhadap dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20  
Uji Validitas Dimensi Partisipasi



Correlations

		tersedia informasi	kesempatan pendapat	kesempatan konsultasi	perbedaan persepsi	pengawasan secara langsung	memperhatika kan opini	tanggapan keluaha pendapat	media nyampaia pendapat	partisipas
Spearman ketersediaan info	Correlation Co	1.000	.730*	.324*	.510*	.447*	.785*	.489*	.362*	.601*
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kesempatan ber	Correlation Co	.730*	1.000	.495*	.588*	.356*	.516*	.686*	.437*	.697*
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kesempatan kor	Correlation Co	.324*	.495*	1.000	.618*	.302*	.116	.458*	.346*	.548*
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.	.000	.002	.252	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
perbedaan persi	Correlation Co	.510*	.588*	.618*	1.000	.568*	.383*	.726*	.544*	.829*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
pengawasan sei	Correlation Co	.447*	.356*	.302*	.568*	1.000	.492*	.538*	.545*	.687*
langsung	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000	.	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
memperhatikan	Correlation Co	.785*	.516*	.116	.383*	.492*	1.000	.464*	.386*	.565*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.252	.000	.000	.	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
tanggapan thd ke	Correlation Co	.489*	.686*	.458*	.726*	.538*	.464*	1.000	.602*	.780*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
media penyamp	Correlation Co	.362*	.437*	.346*	.544*	.545*	.386*	.602*	1.000	.713*
pendapat	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
partisipasi	Correlation Co	.601*	.697*	.548*	.829*	.687*	.565*	.780*	.713*	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\*Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas terhadap pertanyaan dalam dimensi partisipasi menghasilkan koefisien korelasi yang signifikan secara statistik. Semua butir pertanyaan berkorelasi positif dengan skor dimensi partisipasi. Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa kedelapan pertanyaan yang digunakan dalam dimensi partisipasi adalah valid.

### 5.3.2. Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *repeated measure* atau pengukuran berulang dan *one shot* atau pengukuran pada satu waktu. Dalam penelitian ini reliabilitas yang digunakan adalah dengan metode *one shot*. Pada program SPSS, metode ini dilakukan dengan metode Cronbach Alpha, di mana suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60.

Hasil Uji reliabilitas terhadap masing-masing dimensi adalah sebagai berikut:

a. Uji Reliabilitas Dimensi Efisiensi

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.778	8

Tabel 5.21

Uji Reliabilitas Dimensi Efisiensi

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
pendaftaran tidak dipungut biaya	56.4400	35.724	.331	.781
hemat biaya operasional	57.0000	32.667	.643	.752
tepat waktu	56.8500	31.765	.722	.743
hemat waktu	56.8800	30.975	.827	.732
mudah	57.0500	31.523	.642	.745
pendaftaran lebih cepat	56.8500	32.371	.717	.748
proses lebih singkat	56.9900	32.434	.745	.747
efisiensi	30.6200	9.369	1.000	.843

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Cronbach Alpha untuk masing-masing item pertanyaan lebih tinggi dari 0,60 dan hasil pengujian untuk seluruh item pertanyaan menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,778. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada dimensi efisiensi adalah reliabel dalam mengukur dimensi efisiensi.

b. Uji Reliabilitas Dimensi Akuntabilitas

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.803	7

Tabel 5.22

## Uji Reliabilitas Dimensi Akuntabilitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
program sesuai kebijakan	44.8900	41.048	.660	.784
selalu disesuaikan dengan kebijakan baru	44.8400	39.651	.754	.772
kesalahan diminimalisir	44.7700	39.472	.829	.769
proses terdokumentasi	44.8400	39.651	.874	.769
hasil dapat dipertanggungjawabkan	44.7400	38.901	.838	.764
perbaikan kesalahan	44.6500	39.422	.776	.770
akuntabilitas	24.4300	11.763	1.000	.905

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Cronbach Alpha untuk masing-masing item pertanyaan lebih tinggi dari 0,60 dan hasil pengujian untuk seluruh item pertanyaan menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,803. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada dimensi akuntabilitas adalah reliabel dalam mengukur dimensi akuntabilitas.

## c. Uji Reliabilitas Dimensi Responsivitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.786	9

Tabel 5.23

## Uji Reliabilitas Dimensi Responsivitas

## Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
perbaikan layanan	63.6500	46.735	.788	.760
kemampuan petugas	63.6400	46.495	.757	.759
tempat penyampaian pendapat	63.4500	48.008	.680	.769
tanggungjawab petugas	63.4900	47.606	.662	.767
tanggapan yang baik dari petugas	63.2100	46.834	.803	.760
referensi perbaikan	63.5800	45.014	.766	.751
berdasar aturan	63.3400	45.722	.826	.753
pelayanan yang sama	63.2400	47.780	.731	.767
responsivitas	33.8400	13.267	1.000	.909

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Cronbach Alpha untuk masing-masing item pertanyaan lebih tinggi dari 0,60 dan hasil pengujian untuk seluruh item pertanyaan menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,786. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada dimensi responsivitas adalah reliabel dalam mengukur dimensi responsivitas.

## d. Uji Reliabilitas Dimensi Transparansi

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.787	8

Tabel 5.24

## Uji Reliabilitas Dimensi Transparansi

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
sistem dan prosedur	55.8100	41.549	.697	.767
informasi program	55.9300	40.490	.782	.758
kesempatan yang sama	55.9000	40.434	.779	.758
penjelasan keputusan	55.9200	40.276	.739	.758
kontrol thd proses	56.0300	38.878	.845	.745
diketahui pengguna jasa	56.0700	40.571	.595	.764
hak dan kewajiban	56.0300	40.736	.649	.763
transparansi	30.1300	11.670	1.000	.881

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Cronbach Alpha untuk masing-masing item pertanyaan lebih tinggi dari 0,60 dan hasil pengujian untuk seluruh item pertanyaan menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,787. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada dimensi transparansi adalah reliabel dalam mengukur dimensi transparansi.

e. Uji Reliabilitas Dimensi Partisipasi

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.749	8

Tabel 5.25  
Uji Reliabilitas Dimensi Partisipasi

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ketersediaan informasi	56.6600	43.338	.638	.729
kesempatan berpendapat	56.7500	42.553	.717	.721
kesempatan konsultasi	56.6600	42.934	.585	.727
perbedaan persepsi	56.8100	39.974	.816	.699
pengawasan secara langsung	56.7400	40.901	.702	.710
memperhatikan opini	56.7400	43.467	.553	.731
tanggapan thd keluhan	56.8600	40.687	.818	.705
partisipasi	28.4500	10.533	.981	.861

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Cronbach Alpha untuk masing-masing item pertanyaan lebih tinggi dari 0,60 dan hasil pengujian untuk seluruh item pertanyaan menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,749. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada dimensi partisipasi adalah reliabel dalam mengukur dimensi partisipasi.

#### 5.4. Analisis Evaluasi Penerapan SePP Menurut Perspektif Good Governance

Analisis terhadap variabel evaluasi penerapan SePP berdasarkan perspektif *good governance* dideskripsikan ke dalam 5 dimensi, yaitu: efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi.

Hasil dari masing-masing dimensi adalah sebagai berikut:

##### a. Efisiensi

Distribusi jawaban responden terhadap dimensi efisiensi dalam penerapan SePP di Depkominfo adalah sebagai berikut:

- 4 responden (0,57%) menjawab Tidak Setuju
- 47 responden (6,71%) menjawab Netral

- 332 responden (47,42%) menjawab Setuju
- 317 responden (45,28%) menjawab Sangat Setuju

Modus jawaban responden terhadap dimensi efisiensi sebagai elemen *good governance* adalah sebagaimana tersebut pada tabel 5.26.

Tabel 5.26

## Modus Indikator Efisiensi

		Statistics						
		pendaftaran tidak dipungut biaya	hemat biaya operasional	tepat waktu	hemat waktu	mudah	pendaftaran lebih cepat	proses lebih singkat
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
	Mode	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Dari tabel di atas mayoritas responden menjawab setuju terhadap 5 (lima) pertanyaan dalam dimensi efisiensi dan sangat setuju pada 2 (dua) item pertanyaan dalam dimensi efisiensi. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa mayoritas responden menganggap pengadaan barang dan jasa dengan penerapan SePP adalah efisien. Peningkatan efisiensi ini melalui penurunan biaya dan waktu pelayanan serta penyingkatan proses pelayanan.

#### 1. Efisien baik dari segi biaya dan waktu

- dokumen pengadaan tidak berupa dokumen fisik tapi berupa salinan elektronik yang dapat diunduh setiap saat meskipun bukan hari kerja.
- panitia pengadaan dapat lebih fokus menjalankan proses pengadaan
- untuk mendapatkan dokumen pengadaan tidak perlu melakukan pembayaran (pembelian) kepada petugas sehingga meminimalisir potensi korupsi oleh petugas.
- Detail paket pengadaan dapat dilihat kapan pun dan dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu serta tanpa perlu datang ke instansi yang menyelenggarakan pengadaan sehingga tidak perlu ada petugas yang harus

standby melayani penyedia barang dan jasa yang akan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa..

2. Efisien dari segi penyingkatan proses:

Tidak perlu ada beberapa petugas yang melayani penyedia barang dan jasa, karena dengan sistem online, penyedia barang dan jasa cukup membuka aplikasi SePP dan memasukkan aplikasi pengadaan barang dan jasa pada satu tempat dan tidak perlu mendatangi ke berbagai tempat yang diikuti, sehingga hubungan tatap muka dengan panitia pengadaan tidak perlu dilakukan dan korupsi dapat diminimalisir.

**b. Akuntabilitas**

Distribusi jawaban responden terhadap dimensi akuntabilitas dalam penerapan SePP di Depkominfo adalah sebagai berikut:

- 4 responden (0,67%) menjawab Tidak Setuju
- 113 responden (18,83%) menjawab Netral
- 319 responden (53,17%) menjawab Setuju
- 164 responden (27,33%) menjawab Sangat Setuju

Modus jawaban responden terhadap dimensi akuntabilitas sebagai elemen *good governance* adalah sebagaimana tersebut pada tabel 5.27

Tabel 5.27

Modus Indikator Akuntabilitas

Statistics

		program sesuai kebijakan	selalu disesuaikan dengan kebijakan baru	kesalahan diminimalisir	proses terdokumentasi	hasil dapat dipertanggungjawabkan	perbaikan kesalahan
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0
	Mode	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua responden menjawab setuju pada pertanyaan dalam dimensi akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap bahwa pengadaan barang dan jasa dengan penerapan SePP lebih akuntabel. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (*e-government*) dalam hal ini SePP telah mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses informasi, dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Proses pengadaan yang dilakukan melalui SePP telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keppres No. 80 tahun 2003 dan dengan SePP ini merupakan pendukung dan pelengkap proses pengadaan sehingga proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu seluruh peserta pengadaan mendapat informasi yang sama dan dapat mengikuti tahapan pengadaan yang sama sepanjang melakukan akses ke dalam sistem.

### **c. Responsivitas**

Distribusi jawaban responden terhadap indikator responsivitas dalam penerapan SePP di Depkominfo adalah sebagai berikut:

- 74 responden (9,25%) menjawab Netral
- 468 responden (58,5%) menjawab Setuju
- 258 responden (32,25%) menjawab Sangat Setuju

Modus jawaban terhadap dimensi responsivitas sebagai elemen *good governance* adalah sebagaimana tersebut pada tabel 5.28.

Tabel 5.28  
Modus Indikator Responsivitas

		Statistics							
		perbaikan layanan	kemampuan petugas	tempat penyampaian pendapat	anggungan ab petugas	tanggapan yang baik dari petugas	pelayanan yang sama	berdasar aturan	referensi perbaikan
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mode	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00 <sup>a</sup>	4.00	4.00	4.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Dari tabel di atas mayoritas responden menjawab setuju pada pertanyaan pada dimensi responsivitas dan responden menjawab sangat setuju pada item pertanyaan mengenai tanggapan yang baik dari petugas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap bahwa responsivitas pegawai PPE dalam pengadaan barang dan jasa dalam penerapan SePP adalah baik. Responsivitas menyangkut kemampuan aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Dalam penerapan SePP semua petugas telah dibekali kemampuan dalam mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Setiap petugas pelayanan juga ikut bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan setiap ada permasalahan dan memberikan penjelasan dengan detail dan jelas setiap pendapat/keluhan/pertanyaan dari pengguna jasa.

#### d. Transparansi

Distribusi jawaban responden terhadap indikator transparansi dalam penerapan SePP di Depkominfo adalah sebagai berikut:

- 70 responden (10%) menjawab Netral
- 347 responden (49,57%) menjawab Setuju
- 283 responden (40,43%) menjawab Sangat Setuju

Modus jawaban responden terhadap dimensi transparansi sebagai elemen *good governance* adalah sebagaimana tersebut pada tabel 5.29.

Tabel 5.29  
Modus Indikator Transparansi

**Statistics**

		sistem dan prosedur	informasi program	kesempatan yang sama	penjelasan keputusan	kontrol thd proses	diketahui pengguna jasa	hak dan kewajiban
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
	Mode	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan setuju terhadap transparansi penerapan SePP. Transparansi meliputi penyusunan sistem dan prosedur pelayanan yang jelas, serta penjelasan secara tegas dan detil tentang tugas, kewajiban dan wewenang petugas, juga hak dan kewajiban para pengguna jasa. Dengan demikian penyedia barang dan jasa akan selalu dapat menilai apakah pelaksanaan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Seluruh detail paket, nilai pagu pekerjaan, jadwal pengadaan, peserta pengadaan dapat dilihat oleh seluruh pengguna tanpa perlu memiliki identitas pengguna. Selain itu, dengan penerapan SePP setiap perusahaan dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa dan dapat ikut mengawasi jalannya proses pengadaan barang dan jasa dari ada pengumuman pengadaan barang dan jasa sampai dengan pengadaan selesai

### e. Partisipasi

Distribusi jawaban responden terhadap indikator partisipasi dalam penerapan SePP di Depkominfo adalah sebagai berikut:

- 16 responden (2%) menjawab Tidak Setuju
- 95 responden (11,87%) menjawab Netral
- 522 responden (65,25%) menjawab Setuju
- 167 responden (20,88%) menjawab Sangat Setuju

Modus jawaban responden terhadap dimensi partisipasi sebagai elemen *good governance* adalah sebagaimana tersebut pada tabel 5.30. Distribusi jawaban responden terhadap indikator partisipasi dalam penerapan SePP di Depkominfo adalah sebagai berikut:

Tabel 5.30

Tabulasi Indikator Partisipasi

#### Statistics

		ketersediaan informasi	kesempatan berpendapat	kesempatan konsultasi	perbedaan persepsi	pengawasan secara langsung	memperhatikan opini	tanggapan thd keluhan	media penyampaian pendapat
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mode	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Dari tabel di atas, mayoritas responden yang menyatakan setuju terhadap dimensi partisipasi dalam penerapan SePP. Partisipasi menurut teori Arnsstein (1982) adalah kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Dalam penerapan SePP responden menganggap mereka dapat berpartisipasi aktif dalam penerapan SePP. Wujud partisipasi responden diwujudkan dengan pemberian kesempatan untuk memberikan suara dan pendapat serta kesempatan apabila memerlukan konsultasi/penjelasan tentang SePP, serta adanya media penyampaian pendapat yang cukup memadai antara lain dengan tersedianya *helpdesk* SePP. Masyarakat juga dapat berpartisipasi melakukan monitoring terhadap proses pengadaan yang sedang berlangsung.

Di samping itu, jika dilihat dari sisi jumlah, perusahaan yang sudah terdaftar dan dapat mengikuti kegiatan pengadaan adalah sebanyak 1139 yang berasal dari 16 provinsi diseluruh Indonesia. Artinya dalam 1 (satu) paket pengadaan terdapat kemungkinan 1139 perusahaan mengikuti pengadaan. Sehingga dengan penerapan SePP partisipasi dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa cukup tinggi sehingga akan sulit untuk petugas/panitia pengadaan jika akan bertindak kurang fair atau tidak sesuai prosedur karena akan banyak perusahaan yang ikut memonitor proses pengadaan barang dan jasa sehingga tidak memungkinkan petugas/panitia pengadaan barang dan jasa untuk korupsi.

#### f. Evaluasi Penerapan SePP

Dari total skor pertanyaan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.31  
Variabel Evaluasi Penerapan SePP

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	31	31.0	31.0	31.0
Sangat Baik	69	69.0	69.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 31 responden menilai evaluasi penerapan SePP menurut perspektif *good governance* di Depkominfo adalah baik dan 69 responden menilai evaluasi penerapan SePP menurut perspektif *good governance* di Depkominfo adalah sangat baik. Hasil deskriptif dari tiap-tiap dimensi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.32  
Statistik Deskriptif Tiap Dimensi

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>efisiensi</i>	100	24.00	35.00	30.6200	3.06093
<i>akuntabilitas</i>	100	16.00	30.00	24.4300	3.42968
<i>responsivitas</i>	100	27.00	40.00	33.8400	3.64240
<i>transparansi</i>	100	22.00	35.00	30.1300	3.41611
<i>partisipasi</i>	100	25.00	40.00	32.3600	3.71326
<i>Valid N (listwise)</i>	100				

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Penilaian tiap dimensi pada evaluasi penerapan SePP sebagaimana tabel di atas, dibagi ke dalam 5 kelas sesuai kategori jawaban, yaitu sebagai berikut:

- 1 - 36 : Sangat buruk
- 37 - 72 : Buruk
- 73 - 108 : Netral
- 109 - 144 : Baik
- 145 - 180 : Sangat Baik

Jika dilihat dari kelima dimensi di atas, dapat dilihat bahwa pada umumnya responden menilai evaluasi penerapan SePP menurut perspektif *good governance* di Depkominfo memberikan skor yang cukup tinggi pada dimensi *responsibilitas*.

Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responden cenderung memiliki penilaian yang positif terhadap dimensi *responsivitas* antara lain disebabkan karena dalam SePP pelayanan dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan selama 7 hari dalam seminggu. Selain itu bagi responden yang memerlukan pelayanan secara langsung disediakan *helpdesk*

dengan petugas yang siap membantu penyedia barang dan jasa yang membutuhkan informasi selama hari kerja Senin s.d. Jumat, pukul 08.00 s.d. pukul 16.00.

Pada dimensi akuntabilitas responden cenderung memberikan nilai yang kurang baik disbanding dengan dimensi yang lain. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Responden cenderung memiliki penilaian yang kurang baik terhadap dimensi akuntabilitas karena kurangnya pengetahuan yang komprehensif mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa yang selalu berkembang dan responden menilai bahwa pendapat/keluhan/pertanyaan yang mereka sampaikan belum dijadikan referensi perbaikan pelayanan dalam SePP.

Untuk mengevaluasi penerapan SePP menurut perspektif *good governance* maka peneliti melakukan analisis tabulasi silang antara beberapa karakteristik perusahaan dan karakteristik responden dengan evaluasi penerapan SePP menurut perspektif *good governance* yang meliputi 5 (lima) dimensi yaitu: efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi.

Untuk menganalisis hasil evaluasi penerapan SePP menurut perspektif *good governance*, peneliti melakukan analisis tabulasi silang antara kategori perusahaan dengan evaluasi penerapan SePP menurut perspektif *good governance*. Adapun hasil tabulasi silang antara kategori perusahaan dengan evaluasi penerapan SePP menurut perspektif *good governance* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.33

Hasil Tabulasi Silang Kategori Perusahaan dengan Evaluasi SePP

**Kategori Perusahaan \* Evaluasi penerapan SePP Crosstabulation**

			Evaluasi penerapan SePP		Total
			Baik	Sangat Baik	
Kategori Perusahaan	barang	Count	13	16	29
		% within Kategori Perusahaan	44.8%	55.2%	100.0%
	jasa lainnya	Count	8	6	14
		% within Kategori Perusahaan	57.1%	42.9%	100.0%
	pemborongan	Count	1	6	7
		% within Kategori Perusahaan	14.3%	85.7%	100.0%
	jasa konsultasi konstruksi	Count	0	7	7
	% within Kategori Perusahaan	.0%	100.0%	100.0%	
jasa konsultasi non konstruksi	Count	6	12	18	
	% within Kategori Perusahaan	33.3%	66.7%	100.0%	
barang dan jasa	Count	3	22	25	
	% within Kategori Perusahaan	12.0%	88.0%	100.0%	
Total	Count	31	69	100	
	% within Kategori Perusahaan	31.0%	69.0%	100.0%	

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Dari tabel di atas responden yang menyatakan bahwa evaluasi penerapan SePP sangat baik paling banyak adalah responden dengan kategori perusahaan pengadaan jasa konsultasi konstruksi (100%) dan responden yang menyatakan penerapan SePP baik paling banyak adalah perusahaan dengan kategori pengadaan jasa lainnya yaitu 57,1%.

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pada umumnya semua perusahaan menilai penerapan SePP sudah sangat baik, namun untuk perusahaan dengan kategori pengadaan jasa lainnya menilai baik. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dengan kategori pengadaan jasa lainnya lebih sedikit mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui SePP karena jenis

pengadaan yang paling sering dilaksanakan adalah jenis pengadaan barang dan jenis pengadaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan rutin instansi pemerintah.

Peneliti juga melakukan analisis tabulasi silang antara skala modal perusahaan dengan evaluasi penerapan sepp menurut perspektif *good governance*. Adapun hasil tabulasi silang antara skala modal perusahaan dengan evaluasi penerapan SePP menurut perspektif *good governance* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.34

### Hasil Tabulasi Silang Skala Modal dengan Evaluasi SePP

#### skalamodal \* EvaluasipenerapanSePP Crosstabulation

			EvaluasipenerapanSePP		Total
			Baik	Sangat Baik	
skalamodal	51-500 juta	Count	17	41	58
		% within skalamodal	29.3%	70.7%	100.0%
	501-1 milyar	Count	6	16	22
		% within skalamodal	27.3%	72.7%	100.0%
	di atas 1 Milyar	Count	8	12	20
		% within skalamodal	40.0%	60.0%	100.0%
Total		Count	31	69	100
		% within skalamodal	31.0%	69.0%	100.0%

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Dari hasil sebagaimana tabel diatas dapat dikatakan bahwa pada umumnya semua perusahaan menilai evaluasi penerapan SePP menurut perspektif *good governance* sudah sangat baik. Dari tabel diatas responden yang menyatakan bahwa penerapan SePP sangat baik paling banyak adalah perusahaan dengan modal antara 501 – 1 Milyar yaitu sebesar 72,7%, dan responden yang menyatakan bahwa penerapan SePP baik paling banyak adalah responden dari perusahaan dengan modal di atas 1 Milyar yaitu sebesar 40,0%. Perusahaan dengan modal yang cenderung semakin besar cenderung memberikan penilaian

yang berbeda dengan perusahaan dengan modal yang lebih kecil. Perusahaan dengan modal lebih besar cenderung lebih kritis penerapan SePP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Analisis Tabulasi Silang antara bentuk badan hukum perusahaan dengan evaluasi penerapan sepp menurut perspektif *good governance* juga dilakukan untuk lebih memperkuat hasil evaluasi penerapan SePP menurut kategori bentuk badan hukum perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pada umumnya semua perusahaan menilai evaluasi penerapan SePP menurut perspektif *good governance* sudah sangat baik, namun untuk perusahaan dengan bentuk badan hukum perorangan menilai penerapan SePP menurut perspektif *good governance* adalah baik. Adapun hasil tabulasi silang antara bentuk badan hukum dengan evaluasi penerapan SePP menurut perspektif *good governance* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.35

#### Hasil Tabulasi Silang Bentuk Badan Hukum dengan Evaluasi SePP

##### Bentuk Badan Hukum \* Evaluasi penerapan SePP Crosstabulation

			Evaluasi penerapan SePP		Total
			Baik	Sangat Baik	
Bentuk Badan Hukum	Perorangan	Count	3	2	5
		% within Bentuk Badan Hukum	60.0%	40.0%	100.0%
	PT (Tbk)	Count	3	12	15
		% within Bentuk Badan Hukum	20.0%	80.0%	100.0%
	CV	Count	10	12	22
		% within Bentuk Badan Hukum	45.5%	54.5%	100.0%
	PT (Non Tbk)	Count	15	43	58
		% within Bentuk Badan Hukum	25.9%	74.1%	100.0%
Total		Count	31	69	100
		% within Bentuk Badan Hukum	31.0%	69.0%	100.0%

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan penerapan SePP sudah sangat baik paling banyak adalah perusahaan dengan bentuk badan hukum PT (Tbk) yaitu sebesar 80,0%, dan responden yang menyatakan penerapan SePP sudah baik paling banyak adalah perusahaan dengan bentuk badan hukum perorangan yaitu sebesar 60,0%. Perusahaan dengan bentuk PT (Tbk) menilai penerapan SePP sudah sangat baik karena mayoritas perusahaan merupakan perusahaan nasional, dimana salah satu syarat pendirian PT adalah minimal dua orang WNI, dan berdasar UU 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas syarat untuk mendirikan PT adalah dengan modal di atas 50 juta rupiah.

Analisis Tabulasi Silang antara Usia responden dengan Evaluasi Penerapan SePP Menurut Perspektif *Good Governance* dilakukan untuk melihat kaitan antara usia responden dengan pendapat responden mengenai evaluasi penerapan SePP. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pada umumnya responden menyatakan bahwa evaluasi penerapan SePP sudah sangat baik Adapun hasil tabulasi silang antara usia dengan penerapan SePP adalah sebagai berikut:

Tabel 5.36

Hasil Tabulasi Silang Usia Dengan Evaluasi SePP

## usia \* EvaluasipenerapanSePP Crosstabulation

			EvaluasipenerapanSePP		Total
			Baik	Sangat Baik	
usia	0 - 30 tahun	Count	3	6	9
		% within usia	33.3%	66.7%	100.0%
	31 - 40 tahun	Count	21	35	56
		% within usia	37.5%	62.5%	100.0%
	41 50 tahun	Count	5	25	30
		% within usia	16.7%	83.3%	100.0%
	di atas 50 tahun	Count	2	3	5
		% within usia	40.0%	60.0%	100.0%
Total		Count	31	69	100
		% within usia	31.0%	69.0%	100.0%

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan bahwa penerapan SePP sudah sangat baik paling banyak adalah responden dengan usia 41 – 50 tahun, yaitu sebesar 83,3%, sedangkan responden yang menyatakan bahwa penerapan SePP sudah baik paling banyak adalah responden dengan usia di atas 50 tahun itu sebesar 40,0%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden yang masih dalam kategori usia produktif menganggap bahwa penerapan SePP sangat membantu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dikarenakan dapat menghemat waktu mereka dalam pelaksanaan/proses pengadaan sehingga tidak menyita waktu dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas lain yang menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ambar TS & Sutiono, Agus, 2004, Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Gaya Media, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1992, Manajemen Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta
- Azwar, Saifuddin, 1997, Reliabilitas dan Validitas, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Bovaird.T and Loffler.E, 2005, Public Management and Governanve (Governance and government: Networking with external stakeholder), Routhledge, London
- Davis, Gordon B, 1995, Sistem Informasi Manajemen, PT.Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
- Dwiyanto, Agus, cetakan ketiga 2008, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Dwiyanto, Agus dan Kusumasari. 2001. *Public Service Performance* dalam *Policy Brief* CPPS-Gadjah Mada University, Nomor : 01/PB-E/2001, Yogyakarta
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Penerbit PSKK UGM, Yogyakarta
- Gordon, George J, 1982, Public Administration In America, St. Martin's Press, New York
- Indrajit, Richardus Eko, 2001, *Electronic Government*, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Irawan, Prasetya, 2007, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, DIA FISIP UI, Jakarta.
- Istianto, Bambang, 2009, Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Jogiyanto HM, 2003, Sistem Teknologi Informasi, Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Kerlinger, Fred N, 2006, Asas-asas Penelitian Behavioral, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Margono, Subando Agus, 2004, Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Kroenke, David and Hatch, Richard, 1994, *Management Information System*, McGraw-Hill, Inc, New York
- Lina M. Jannah, Bambang P, 2005, Metode Penelitian Kuantitatif, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara RI, 2003, Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara RI, 2005, SANKRI, Buku III – Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara RI, 2007, Penerapan Good Governance di Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Moenir, A.S., 2002, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia Penerbit Bumi Aksara , Jakarta.
- Mustopadidjaya, 2005, Manajemen Proses Kebijakan Publik, Lembaga Administrasi Negara - Duta Pertiwi Foundation, Jakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin & Hardius Usman, 2007, Proses Penelitian Kuantitatif, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta
- Nirwana SK. Sitepu, 1994, Analisis korelasi, Unit Pelayanan Statistika Jurusan Statistika UNPAD, Bandung
- Prasetyo, Bambang dan Lina miftahul Jannah, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Santoso, Purbayu Badi dan Ashari, 2005, Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS, Andi, Yogyakarta

- Saragih, D. Ferdinand,dkk, 2007, Teknik Kuantitatif Untuk Bisnis dan Ekonomi, Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI, Depok.
- Sedarmayanti, 2003, Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung
- Sedarmayanti, 2004, Good Governance Bagian Kedua, Mandar Maju, Bandung
- Siagian, Sondang, cetakan keenam, 2008, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya, Bumi Aksara, Jakarta
- Singarimbun, Masri & Efendi, 1995, Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES.
- Skelcher, Chris, 1992, *Managing For Service Quality*.Longman Group, U.K. Lpd, London.
- Subarna, M.,Sudrajat, 2001, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Pustaka Setia, Bandung.
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Suherman, Ade Maman, 2010, Pengadaan Barang dan Jasa (*Government Procurement*) Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sumarto, Hetifah Sj., 2009, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2008, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar grafika, Jakarta.
- Sutojo, Siswanto & E.John Aldridge, Cetakan Kedua, 2008, Damar Mulia Pustaka, Jakarta
- Thoha, Miftah, 2007, Birokrasi & Politik di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tjokroaminoto, Bintoro, 2004, Reformasi Nasional penyelenggaraan *good governance* dalam perwujudan Masyarakat Madani, LAN, Jakarta
- Uyanto, Stanislaus S, Edisi Ketiga, 2009, Pedoman Analisis Data dengan SPSS, Graha Ilmu, Yogyakarta

## **Jurnal, Artikel, Makalah/Paper, Dokumen**

Basilius Bengoteku 2006, Bahan presentasi “Good Governance DBE 1”

Depkominfo, 2007, White Paper e-Procurement di Indonesia

Document of the world Bank, Report No. 21823-IND: Indonesia Procurement  
Assesment Report , 27 March,2001  
(<http://siteressource.worldbanj.org/resources/procurement-assessment.pdf>)

Helen Walker dan Christine Harland dalam [International Journal of Operations & Production Management](#), (2008,831) Bradford: [2008](#). Vol. 28, Iss. 9; pg. 831

Indonesia Procurement Watch bekerjasama dengan SFGG-GTZ, 2005, Tool Kit  
Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Lima Belas  
Langkah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, IPW, SFGG-GTZ,  
Jakarta

Kishor Vaidya, ASM Sajeev, Guy Callender, “Critical Faktors that Influence E-  
Procurement Implementation Success In The Public Sector”, Journal of  
Public Procurement, (Vol 6 No. 1, Boca Raton:2006, p, 70)

Komisi Pemberantasan Korupsi, Mencegah Korupsi Melalui e-Procurement:  
Menuju Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintahan Kota  
Surabaya.([http://www.kpk.go.id/uploads/rnd/mencegah\\_korupsi\\_melalui\\_eprocurement.pdf](http://www.kpk.go.id/uploads/rnd/mencegah_korupsi_melalui_eprocurement.pdf))

Marcos Singer, Garo Konstantinidis, Eduardo Roubik and Eduardo Beffermann  
dalam [Journal of Public Procurement](#). Boca Raton: [2009](#). Vol. 9, Iss. 1 pg.  
58, 21 pgs

Muluk, Mujibur Rahman Khairul, 2006, Desertasi:Partisipasi Masyarakat Dalam  
Pemerintahan Daerah Dengan Pendekatan Berpikir Sistem, Universitas  
Indonesia, Jakarta.

Mustopadidjaja, AR, Prof. Dr., 2008, Kebijakan Publik – Teori dan Aplikasi.

- Ravi Kalakota and Marcia Robinson, *E-Business Roadmap for Success*, (Addison Wesley Longman Inc, 1999,p17)
- Routhledge research in information technology and society, *Local electronic Government, a comparative study*.
- Salomo, Roy.V (2002) “*e-government* : Suatu inovasi dalam kerangka Good Governance”, *Jurnal Bisnis dan Birokrasi* No. 02 Vol X, Mei
- Simon R. Croom and Alistair Brandon-Jones, “ Key Issues in E-Procurement: Procurement Implementation and operation In The Public Sector”, (Vol 5 No. 1, Boca Raton:2005, p, 367)
- Sofian Effendi, 2005, *Membangun Good Governance : Tugas Kita Bersama*.
- The world bank group 'E-Government Definition'*  
(<http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm>).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke-4 Keppres No. 80 tahun 2003
- Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Inpres Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kebijakan Perekonomian Menjelang dan sesudah IMF
- Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Permen PAN Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
- Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik

**Website**

[www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id)

[www.sepp.depkominfo.go.id](http://www.sepp.depkominfo.go.id)

[www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id)

[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

[www.uui.ac.id](http://www.uui.ac.id)

[www.cert.or.id](http://www.cert.or.id)

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

[www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

